

Katalog BPS: 1103003



Data Strategis BPS



BADAN PUSAT STATISTIK

The background features a stylized Indonesian flag with red and white wavy horizontal stripes. A watermark with the URL 'www.bps.go.id' is visible diagonally across the center. The main title is rendered in a bold, golden, serif font with a slight shadow effect.

Data Strategis BPS

DATA STRATEGIS BPS

ISSN: 2087-2011
Katalog BPS: 1103003
Nomor Publikasi: 03220.1202
Ukuran Buku: 16,5 cm x 22 cm
Jumlah Halaman: x + 102

Naskah:

Direktorat Statistik Harga
Direktorat Neraca Produksi
Direktorat Neraca Pengeluaran
Direktorat Statistik Distribusi
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Direktorat Statistik Industri
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penata Letak:

Direktorat Diseminasi Statistik

Gambar Kulit Oleh:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

CV. Nasional Indah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR



Data statistik saat ini sudah menjadi bagian penting dan strategis dalam pengkajian kebijakan dan proses pengambilan keputusan, baik di tingkat makro maupun mikro. Untuk itu, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-67 Republik Indonesia, BPS-RI kembali mempersembahkan publikasi yang berjudul DATA STRATEGIS BPS kepada para pengguna data sebagai wujud partisipasi BPS dalam kiprahnya menyediakan data yang bersifat strategis kepada masyarakat luas khususnya para pengguna data dan pengambil kebijakan.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik. Di samping itu, tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang semakin beragam dan berkualitas (lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan) semakin hari juga semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diperoleh, dan lebih berkualitas.

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, seperti: inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, ketenagakerjaan, industri, produksi tanaman pangan, dan kemiskinan. Di dalam publikasi ini, data yang disajikan juga dilengkapi dengan penjelasan teknis yang tersaji pada bagian akhir buku ini.

Data yang tersaji dalam publikasi ini mungkin belum mampu memenuhi semua keinginan para pengguna data dan mereka yang peduli terhadap data dan informasi, baik dari sisi cakupan maupun tampilan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan penerbitan publikasi-publikasi berikutnya.

Semoga buku ini dapat mencerdaskan bangsa.

Jakarta, Agustus 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia,

Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Pendahuluan	1
Angka Inflasi	5
Pertumbuhan Ekonomi	11
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012	13
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012	16
Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012	17
Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012	19
PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita Tahun 2008–2011	20
Statistik Ekspor Impor Barang	21
Ketenagakerjaan	33
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran	36
Lapangan Pekerjaan Utama	38
Status Pekerjaan Utama	38
Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Provinsi	39
Produksi Tanaman Pangan	43
Produksi Padi	45
Produksi Jagung	48
Produksi Kedelai	50
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur	53
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>q-to-q</i>) Tahun 2010–2012	55
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>)	56
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan (<i>m-to-m</i>)	57

Kemiskinan	59
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1998–2012	62
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012	63
Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012	65
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	65
Penjelasan Teknis Statistik	67
Inflasi	69
Produk Domestik Bruto (PDB)	74
Ekspor-Impor Barang	83
Ketenagakerjaan	87
Produksi Tanaman Pangan.....	92
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur	94
Kemiskinan	97
Daftar Singkatan dan Akronim	99

DAFTAR TABEL

Angka Inflasi	5
Tabel 2.1 Inflasi Nasional, 2009–2012 (2007=100)	8
Tabel 2.2 Perbandingan Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, <i>Year on Year</i> , 2010–2012	9
Tabel 2.3 Inflasi Nasional Juli 2012 Menurut Kelompok Pengeluaran, (2007=100)	9
Tabel 2.4 Andil Inflasi Nasional Kelompok Pengeluaran Juli 2012 (persen)	10
 Pertumbuhan Ekonomi	 11
Tabel 3.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2011 (persen)	14
Tabel 3.2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Semester I-2012 (persen)	15
Tabel 3.3 PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012 (triliun rupiah)	16
Tabel 3.4 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012 (persen)	17
Tabel 3.5 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–2011 (persen)	18
Tabel 3.6 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Semester I-2012 (persen)	18
Tabel 3.7 PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012 (persen)	19
Tabel 3.8 Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012 (persen)	20
Tabel 3.9 PDB dan PNB Per Kapita Indonesia Tahun 2008–2011	20
 Statistik Ekspor-Impor Barang	 21
Tabel 4.1.a Perkembangan Ekspor Indonesia, Januari–Juni 2012	24
Tabel 4.1.b Perkembangan Impor Indonesia, Januari–Juni 2012	25
Tabel 4.2.a Perkembangan Nilai Ekspor Juni 2011–Juni 2012	26
Tabel 4.2.b Perkembangan Nilai Impor Juni 2011–Juni 2012	26
Tabel 4.3.a Ekspor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Dijit Januari–Juni 2012	27

Tabel 4.3.b Impor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Dijit Januari–Juni 2012	28
Tabel 4.4.a Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan Barang Utama Januari–Juni 2012	29
Tabel 4.4.b Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama Januari–Juni 2012	31
Ketenagakerjaan	33
Tabel 5.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan, 2010–2012 (dalam ribuan)	38
Tabel 5.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2010–2012 (juta orang)	39
Tabel 5.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2010–2012 (juta orang)	40
Tabel 5.4 Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Februari 2011–Februari 2012	41
Produksi Tanaman Pangan	43
Tabel 6.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2010–2012	47
Tabel 6.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Menurut <i>Subround</i> , 2010–2012	49
Tabel 6.3 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Menurut <i>Subround</i> , 2010–2012	51
Tabel 6.4 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Menurut Provinsi, 2011–2012 (ton)	52
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur	53
Tabel 7.1 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan Tahun 2010–2012	55
Tabel 7.2 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan Januari 2010–Juni 2012	58
Kemiskinan	59
Tabel 8.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah 1998–2012	63
Tabel 8.2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011 dan Maret 2012	64
Tabel 8.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2011–Maret 2012	66

DAFTAR GAMBAR

Produksi Tanaman Pangan

Gambar 6.1 Perkembangan Produksi Padi, 2009–2012	46
Gambar 6.2 Pola Panen Padi, 2010–2012	46
Gambar 6.3 Perkembangan Produksi Jagung, 2009–2012	48
Gambar 6.4 Pola Panen Jagung, 2010–2012	49
Gambar 6.5 Perkembangan Produksi Kedelai, 2009–2012	50
Gambar 6.6 Pola Panen Kedelai, 2010–2012	51

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur

Gambar 7.1 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q to q), 2010–2012	56
Gambar 7.2 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (y to y), 2010–2012	57

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

1

Pendahuluan

PENDAHULUAN

Buku ini berisi data strategis yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS), disertai penjelasan praktis. Kriteria strategis pada data yang dimaksud paling tidak mencakup pengertian bahwa: (1) data dimaksud selalu di-*update* dan terjamin kekiniannya; (2) banyak digunakan untuk berbagai kajian; (3) dapat menggambarkan fenomena dan bahkan mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi nasional; (4) diseminasinya dinantikan oleh berbagai pihak.

Data strategis mencakup: inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, ketenagakerjaan, produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi industri pengolahan, dan statistik kemiskinan.

Spektrum pengguna data strategis sangat lebar, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum. Lebarnya spektrum pengguna sejalan dengan sifat alamiah data yang memiliki dimensi yang sangat luas. Data dasar mulai dari jumlah penduduk, konsumsi per kapita, nilai tambah sektoral, dan berujung pada, misalnya Produk Domestik Bruto (PDB). Data harga dan perubahannya berujung pada angka inflasi. Data perekonomian internasional mencakup ekspor-impor dan data kepariwisataan. Data produksi primer di antaranya padi, jagung, dan hortikultura. Data Industri pengolahan yang berisi angka pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan sedang. Kondisi ketenagakerjaan seperti angkatan kerja, pengangguran, status berusaha, dan lapangan usaha utama disajikan dalam data ketenagakerjaan. Sesuai pengalaman empiris BPS, data strategis seperti kriteria yang telah disebutkan mencakup: inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, ketenagakerjaan, produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi industri pengolahan dan statistik kemiskinan. Data strategis inilah yang akan disajikan dalam buku ini.

Agar buku ini bisa memenuhi harapan pengguna, pada setiap data yang disajikan diberi penjelasan praktis. Bagi yang ingin membaca penjelasan lebih rinci, dapat memperolehnya pada bagian penjelasan teknis statistik. Bagian ini memberikan informasi yang lengkap tetapi ringkas kepada pembaca tentang konsep definisi, metodologi, pengumpulan data, referensi, dan diseminasi data.

Karena penjelasan yang diberikan bersifat praktis, maka buku ini merupakan media sosialisasi produk statistik BPS bagi para pengambil kebijakan di kalangan pemerintah, legislator, akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai wujud untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik. Dengan semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna data, mereka selanjutnya diharapkan dengan penuh kesadaran, memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan perstatistikan BPS.

Setelah Bab Pendahuluan, pembaca dapat mencermati data terkini tentang Inflasi. Data ini memberikan informasi tentang dinamika



perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah, pelaku bisnis, kalangan perbankan, anggota parlemen, bahkan masyarakat umum berkepentingan terhadap data tersebut.

Pada Bab III pembaca dapat memanfaatkan data PDB yang menggambarkan kinerja ekonomi dari sisi besarnya, dan derivasi data ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi sektoral, tingkat peningkatan harga barang/jasa secara keseluruhan, dan masih ada kemungkinan lain tentang kegunaannya.

Selanjutnya dalam Bab IV disajikan data statistik ekspor-impor untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan internasional, baik dari sisi volume maupun nilai. Pada bab ini juga disajikan rincian komoditi, negara asal dan tujuan, serta pelabuhannya.

Bab V menyediakan data ketenagakerjaan yang mencakup angkatan kerja, penganggur, lapangan usaha, dan distribusi per provinsi di Indonesia. Beberapa indikator juga disajikan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan memperhatikan jadwal survei tenaga kerja di Indonesia, maka data yang disajikan mencakup kondisi terakhir hingga Februari 2011.

Dalam Bab VI, pembaca dapat mencermati penyajian angka ramalan produksi tanaman pangan. Selain memperlihatkan pola panen, data yang disajikan juga mencakup luasan panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Data ini dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan kebijakan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional.

Bab VII menyajikan data pertumbuhan produksi industri pengolahan. Informasi yang ditampilkan meliputi pertumbuhan industri pengolahan besar dan sedang, bulanan dan triwulanan dari tahun 2005 sampai kondisi terakhir triwulan I-2011.

Bab VIII mengantarkan pembaca untuk dapat mencermati data strategis tentang angka kemiskinan. Masalah tersebut merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangannya. Data kemiskinan yang disajikan mulai tahun 1998 hingga tahun 2011 yang dibedakan menurut kota dan desa.

<http://www.bps.go.id>

2

Angka Inflasi

ANGKA INFLASI

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus.¹

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga.

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- a. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai;
- b. Penyesuaian nilai kontrak;
- c. Eskalasi nilai proyek;
- d. Penentuan target inflasi;
- e. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- f. Sebagai pembagi PDB, PDRB;

¹Rumus:

$$INF_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$$

INF = inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t
IHK = Indeks Harga Konsumen



- g. Sebagai proksi perubahan biaya hidup;
h. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Tabel 2.1
Inflasi Nasional, 2009–2012
(2007=100)

Bulan	IHK				Inflasi			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	113,78	118,01	126,29	130,90	-0,07	0,84	0,89	0,76
Februari	114,02	118,36	126,46	130,96	0,21	0,30	0,13	0,05
Maret	114,27	118,19	126,05	131,05	0,22	-0,14	-0,32	0,07
April	113,92	118,37	125,66	131,32	-0,31	0,15	-0,31	0,21
Mei	113,97	118,71	125,81	131,41	0,04	0,29	0,12	0,07
Juni	114,10	119,86	126,50	132,23	0,11	0,97	0,55	0,62
Juli	114,61	121,74	127,35	133,16	0,45	1,57	0,67	0,70
Agustus	115,25	122,67	128,54		0,56	0,76	0,93	
September	116,46	123,21	128,89		1,05	0,44	0,27	
Oktober	116,68	123,29	128,74		0,19	0,06	-0,12	
November	116,65	124,03	129,18		-0,03	0,60	0,34	
Desember	117,03	125,17	129,91		0,33	0,92	0,57	

*) Tahun dasar 2002 (2002=100)

Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 66 kota, pada Juli 2012 terjadi inflasi 0,70 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 132,23 pada Juni 2012 menjadi 133,16 pada Juli 2012. Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh inflasi Juli 2012 sebesar $((133,16-132,23)/132,23) \times 100\% = 0,70\%$. Laju inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2012 sebesar 2,50 persen (IHK Juli 2012 dibandingkan IHK Desember 2011), sedangkan laju inflasi *year on year* (IHK Juli 2012 terhadap IHK Juli 2011) adalah 4,56 persen. Secara periodik, IHK dan inflasi dari Januari 2009 sampai dengan Juli 2012 disajikan pada Tabel 2.1.

*Laju inflasi
tahun kalender
(Januari–Juli) 2012
sebesar 2,50 persen.*

Laju inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2012 adalah sebesar 2,50 persen, sedangkan pada selang waktu yang sama tahun 2011 sebesar 1,74 persen (Tabel 2.2).

Tabel 2.2
Perbandingan Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on Year*, 2010–2012

Inflasi	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Juli	1,57	0,67	0,70
2. Januari–Juli (Tahun Kalender)	4,02	1,74	2,50
3. Juli (tahun n) terhadap Juli (tahun n-1) (<i>year on year</i>)	6,22	4,61	4,56

Inflasi Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran

Inflasi year on year (IHK Juli 2012 terhadap IHK Juli 2011) sebesar 4,56 persen

Barang dan jasa dalam IHK dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran. Besarnya inflasi pada Juli 2012 untuk masing-masing kelompok tersebut adalah: kelompok bahan makanan (1,68 persen); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,89 persen); kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,16 persen); kelompok sandang (0,18 persen); kelompok kesehatan (0,42 persen); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (0,56 persen); dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (0,31 persen).

Inflasi *year on year* (IHK Juli 2012 terhadap Juli 2011) sebesar 4,56 persen. Secara rinci, IHK dan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Inflasi Nasional Juli 2012 Menurut Kelompok Pengeluaran (2007=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Bulan Juli 2012 ¹⁾	Laju Inflasi Tahun Kalender 2012 ²⁾	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾
	Juli 2011	Desember 2011	Juli 2012			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	127,35	129,91	133,16	0,70	2,50	4,56
1. Bahan Makanan	148,52	152,76	158,94	1,68	4,05	7,02
2. Makanan Jadi, minuman, Rokok, dan Tembakau	135,98	138,57	143,98	0,89	3,90	5,88
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	122,36	123,95	126,39	0,16	1,97	3,29
4. Sandang	130,65	136,35	137,96	0,18	1,18	5,60
5. Kesehatan	119,50	120,79	123,04	0,42	1,86	2,96
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	120,20	123,94	125,25	0,56	1,06	4,20
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	107,24	108,14	109,25	0,31	1,03	1,87

¹⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2012 terhadap IHK bulan sebelumnya

²⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2012 terhadap IHK Desember 2011

³⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2012 terhadap IHK Juli 2011

Tabel 2.4
Andil Inflasi Nasional (persen) Menurut Kelompok Pengeluaran Juli 2012

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)
U M U M	0,70
1. Bahan Makanan	0,39
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,16
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,04
4. Sandang	0,01
5. Kesehatan	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,03
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,05

Pada Juli 2012 andil inflasi menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,04 persen; kelompok sandang 0,01 persen, kelompok kesehatan 0,02 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,05 persen (Tabel 2.4).

<http://www.bps.go.id>

3

Pertumbuhan Ekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi—tenaga kerja, tanah, modal, dan *entrepreneurship*—yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Penghitungan PDB mempertimbangkan produksi domestik tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDB. Apabila “diibaratkan” kue, PDB adalah besarnya kue tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya “kue” tersebut yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDB pada tahun tertentu terhadap PDB tahun sebelumnya.

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan (*constant prices*) dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000. Konsep dan definisi secara lebih lengkap disajikan dalam penjelasan teknis statistik. Berikut ini diuraikan data PDB dengan berbagai turunannya.

1. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012

Ekonomi Indonesia selama tahun 2008–2011 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,0 persen (2008), 4,6 persen (2009), 6,2 persen (2010) dan 6,5 persen (2011) dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada semester I tahun 2012 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2011 tumbuh sebesar 2,2 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun

³Secara rumus pertumbuhan ekonomi adalah:

$$PE = \left(\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

PE = pertumbuhan ekonomi
 PDB = Produk Domestik Bruto
 t = tahun tertentu
 t-1 = tahun sebelumnya

2011 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 6,3 persen. Angka-angka tersebut diperoleh dari penerapan rumus di atas kedalam besaran PDB tahun 2008–2011 serta semester I tahun 2012 atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi selama tahun 2008–2011 selalu mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 16,6 persen (2008), 15,8 persen (2009), 13,4 persen (2010), dan 10,7 persen (2011). Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2008 dan 2009. Setelah itu giliran Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang memberikan kontribusi tertinggi diikuti Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kedua sektor ini berkontribusi paling tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada semester I tahun 2012, sumber pertumbuhan terbesar masih berasal dari Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 1,5 persen terhadap total pertumbuhan sebesar 6,3 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,7 persen (*y-on-y*). Sementara Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan masing-masing sebesar 1,4 persen dan 1,0 persen dengan laju pertumbuhan masing-masing 5,5 persen dan sebesar 10,2 persen. Pada semester ini, pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi masih yang tertinggi dibanding sektor lain (Tabel 3.2).

Pada semester I tahun 2012 sumber pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Tabel 3.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–2011 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	4,8	4,0	3,0	3,0	0,7	0,5	0,4	0,4
2. Pertambangan dan Penggalan	0,7	4,5	3,6	1,4	0,1	0,4	0,3	0,1
3. Industri Pengolahan	3,7	2,2	4,7	6,2	1,0	0,6	1,2	1,6
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	10,9	14,3	5,3	4,8	0,1	0,1	0,0	0,1
5. Konstruksi	7,6	7,1	7,0	6,7	0,5	0,4	0,5	0,4
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,9	1,3	8,7	9,2	1,2	0,2	1,5	1,6
7. Pengangkutan dan Komunikasi	16,6	15,8	13,4	10,7	1,2	1,3	1,2	1,0
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	8,2	5,2	5,7	6,8	0,8	0,5	0,5	0,7
9. Jasa-jasa	6,2	6,4	6,0	6,7	0,6	0,6	0,6	0,6
PDB	6,0	4,6	6,2	6,5	6,0	4,6	6,2	6,5
PDB Tanpa Migas	6,5	5,0	6,6	6,9	–	–	–	–

Tabel 3.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Semester I-2012 (persen)

Lapangan Usaha	Semester I-2012 Terhadap Semester II-2011	Semester I-2012 Terhadap Semester I-2011	Sumber Pertumbuhan y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	8,8	4,0	0,5
2. Pertambangan dan Penggalian	0,3	2,9	0,2
3. Industri Pengolahan	0,1	5,5	1,4
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,0	5,6	0,0
5. Konstruksi	-0,2	7,2	0,5
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,5	8,7	1,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,6	10,2	1,0
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	3,7	6,7	0,7
9. Jasa-jasa	0,7	5,6	0,5
PDB	2,2	6,3	6,3
PDB Tanpa Migas	2,4	6,8	-

Semester I tahun 2012 PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp1.283,4 triliun.

PDB atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2008 mencapai Rp2.082,5 triliun rupiah dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp2.463,2 triliun rupiah. Sementara pada semester I tahun 2012, PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp1.283,4 triliun rupiah. PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp4.948,7 triliun rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp7.427,1 triliun rupiah pada tahun 2011. Sementara pada semester I tahun 2012 nilainya sebesar Rp4.027,8 triliun rupiah (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008–Semester I-2012 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	716,7	857,2	985,4	1 093,5	604,4	284,6	295,9	304,7	313,7	166,8
2. Pertambangan dan Pengalihan	541,3	592,1	718,1	886,3	502,1	172,5	180,2	186,6	189,2	96,1
3. Industri Pengolahan	1 376,4	1 477,5	1 595,8	1 803,5	949,5	557,8	570,1	597,1	634,2	325,8
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	40,9	46,7	49,1	55,7	30,1	15,0	17,1	18,1	18,9	9,8
5. Konstruksi	419,7	555,2	660,9	756,5	410,1	131,0	140,3	150,0	160,1	82,8
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	691,5	744,5	882,5	1 022,1	549,8	363,8	368,5	400,5	437,3	229,4
7. Pengangkutan dan Komunikasi	312,2	353,7	423,2	491,2	262,9	165,9	192,2	218,0	241,3	128,8
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	368,1	405,2	466,6	535,0	290,3	198,8	209,2	221,0	236,1	124,1
9. Jasa-jasa	481,9	574,1	654,7	783,3	428,6	193,1	205,4	217,8	232,5	119,8
PDB	4 948,7	5 606,2	6 436,3	7 427,1	4 027,8	2 082,5	2 178,9	2 313,8	2 463,2	1 283,4
PDB Tanpa Migas	4 427,6	5 141,4	5 936,2	6 794,4	3 699,1	1 939,6	2 036,7	2 171,0	2 321,8	1 214,0

2. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008–Semester I-2012

Distribusi PDB menurut sektor atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun tersebut. Tiga sektor utama: Sektor Pertanian; Industri Pengolahan; dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yaitu sebesar 56,3 persen pada tahun 2008, 55,0 persen (2009), 53,8 persen (2010) dan 52,8 persen (2011) serta 52,3 persen pada semester I tahun 2012. Pada tahun 2011 Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 24,3 persen, Sektor Pertanian 14,7 persen, dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13,8 persen; sama halnya pada semester I tahun 2012 komposisi ini tidak mengalami perubahan yaitu Sektor Industri Pengolahan sebesar 23,6 persen, Sektor Pertanian 15,0 persen, dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13,7 persen (Tabel 3.4).

Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian.

Tabel 3.4
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008–Semester I-2012 (persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	14,5	15,3	15,3	14,7	15,0
2. Pertambangan dan Penggalian	10,9	10,6	11,1	11,9	12,5
3. Industri Pengolahan	27,8	26,4	24,8	24,3	23,6
4. Listrik Gas, dan Air Bersih	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
5. Konstruksi	8,5	9,9	10,3	10,2	10,2
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14,0	13,3	13,7	13,8	13,7
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,3	6,3	6,6	6,6	6,5
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
9. Jasa-jasa	9,7	10,2	10,2	10,5	10,6
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PDB Tanpa Migas	89,5	91,7	92,2	91,5	91,8

3. Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari sisi pengeluaran, pada tahun 2008 hingga semester 1 tahun 2012 selalu menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali ekspor dan impor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2009.

Pada tahun 2011, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,7 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,2 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,8 persen, ekspor barang dan jasa sebesar 13,6 persen, dan impor barang dan jasa sebesar 13,3 persen (Tabel 3.5).

Tabel 3.5
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan
Tahun 2008–2011 (persen)

Jenis Penggunaan	Laju Pertumbuhan				Sumber Pertumbuhan			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,3	4,9	4,7	4,7	3,1	2,8	2,7	2,7
2. Konsumsi Pemerintah	10,4	15,7	0,3	3,2	0,8	1,3	0,0	0,3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,9	3,3	8,5	8,8	2,7	0,8	2,0	2,1
3. Ekspor	9,5	-9,7	15,3	13,6	4,6	-4,8	6,5	6,3
4. Dikurangi: Impor	10,0	-15,0	17,3	13,3	3,9	-6,0	5,6	4,8
PDB	6,0	4,6	6,2	6,5	6,0	4,6	6,2	6,5

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester I tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012 terhadap semester I tahun 2011 (*c-to-c*) meningkat sebesar 6,3 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen pembentukan modal, impor barang dan jasa serta pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing sebesar 11,2 persen, 9,5 persen, dan 6,5 persen. Sumber pertumbuhan terbesar semester I-2012 dibandingkan dengan semester I-2011 berasal dari komponen impor barang dan jasa sebesar 3,6 persen (Tabel 3.6).

Sumber pertumbuhan terbesar semester I-2012 dibandingkan dengan semester I-2011 berasal dari komponen impor barang dan jasa sebesar 3,6 persen.

Tabel 3.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan
Semester I-2012 (persen)

Jenis Penggunaan	Semester I-2012 Terhadap Semester II-2011	Semester I-2012 Terhadap Semester I-2011	Sumber Pertumbuhan <i>c-to-c</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,6	5,0	2,8
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-27,7	6,5	0,4
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	0,9	11,2	2,6
4. Ekspor Barang dan Jasa	-5,1	4,8	2,3
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,9	9,5	3,6
PDB	2,2	6,3	6,3

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebesar Rp 2.999,9 triliun meningkat menjadi Rp 4.053,4 triliun (2011). Demikian pula atas dasar harga konstan, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari Rp 1.191,2 triliun (2008) menjadi sebesar Rp 1.369,9 triliun (2011). Sementara besaran nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada semester I tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar Rp2.169,2 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp707,1 triliun (Tabel 3.7).

Tabel 3.7
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012 (triliun rupiah)

Jenis Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 999,9	3 290,8	3 643,4	4 053,4	2 169,2	1 191,2	1 249,0	1 308,3	1 369,9	707,1
2. Konsumsi Pemerintah	416,9	537,6	581,9	667,4	321,4	169,3	195,8	196,4	202,6	87,3
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 370,7	1 744,4	2 065,0	2 378,3	1 302,6	493,8	510,1	553,3	602,1	318,5
4. a. Perubahan Inventori	5,8	-7,3	31,6	55,6	122,8	2,2	-2,0	11,0	21,9	45,6
b. Diskrepansi Statistik	103,1	-119,0	6,3	167,5	156,7	27,0	1,1	6,1	-11,5	11,8
5. Ekspor	1 475,1	1 354,4	1 584,7	1 955,4	988,0	1 032,3	932,2	1 074,6	1 220,4	607,9
6. Dikurangi: Impor	1 422,9	1 197,1	1 476,6	1 850,5	1032,8	833,3	708,5	831,4	942,2	494,7
PDB	4 948,6	5 603,8	6 436,3	7 427,1	4 027,8	2 082,5	2 177,7	2 313,8	2 463,2	1 283,4

4. Struktur PDB Menurut Penggunaan Tahun 2008–Semester I-2012

Dilihat dari distribusi PDB penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; yaitu sebesar 60,6 persen (2008), 58,7 persen (2009), 56,6 persen (2010) dan 54,6 persen (2011) serta 53,9 persen pada semester I-2012. Komponen penggunaan lainnya yang cukup berperan yaitu pembentukan modal tetap bruto. Pada tahun 2008 peranan pembentukan tetap bruto sebesar 27,7 persen dan meningkat lebih tinggi menjadi 32,0 persen pada tahun 2011 dan 32,3 persen pada semester I-2012 (Tabel 3.8).

Tabel 3.8
Struktur PDB Menurut Penggunaan
Tahun 2008–Semester I-2012 (persen)

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010	2011	Smt I-2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,6	58,7	56,6	54,6	53,9
2. Konsumsi Pemerintah	8,4	9,6	9,0	9,0	8,0
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,7	31,1	32,1	32,0	32,3
4. a. Perubahan Inventori	0,1	-0,1	0,5	0,8	3,0
b. Diskrepansi Statistik	2,1	-2,1	0,1	2,3	3,9
5. Ekspor Barang dan Jasa	29,8	24,2	24,6	26,3	24,5
6. Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	28,7	21,4	22,9	24,9	25,6
PDB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

5. PDB dan Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita Tahun 2008–2011

PDB/PNB per kapita adalah PDB/PNB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama tahun 2008-2011 PDB per kapita terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp21,4 juta (US\$2.244,6), tahun 2009 sebesar Rp23,9 juta (US\$2.349,8), tahun 2010 sebesar Rp27,1 juta (US\$3.010,1), dan tahun 2011 sebesar Rp30,8 juta (US\$3.542,9). Demikian juga, PNB per kapita juga terus meningkat selama tahun 2008-2011. PNB per kapita pada tahun 2008 sebesar Rp20,7 juta (US\$2.164,8) meningkat menjadi Rp29,9 juta (US\$3.441,9) pada tahun 2011 (Tabel 3.9).

Selama tahun 2008–2011 PDB per kapita terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.9
PDB dan PNB Per Kapita Indonesia
Tahun 2008–2011

Uraian	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	21,4	23,9	27,1	30,8
• Nilai (US\$)	2 244,6	2 349,8	3 010,1	3 542,9
PNB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku				
• Nilai (juta rupiah)	20,7	23,1	26,3	29,9
• Nilai (US\$)	2 164,8	2 267,6	2 925,4	3 441,9

<http://www.bps.go.id>

4

Statistik Ekspor-Impor Barang

STATISTIK EKSPOR-IMPOR BARANG

BPS secara periodik menyajikan data statistik ekspor-impor barang (*tradable goods*). Data tersebut disusun dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Data ini termasuk kategori data yang mempunyai tenggang waktu (*time lag*) cukup singkat antara pengumpulan dan diseminasinya, yaitu hanya 2 (dua) bulan.

Pencatatan sejak Januari 2008 menggunakan sistem perdagangan umum (general trade).

Seperti halnya pencatatan Statistik Ekspor yang sudah menggunakan sistem perdagangan umum (*general trade system*), maka sejak Januari 2008 pencatatan Statistik Impor pun menggunakan sistem perdagangan umum (*general trade system*) di mana barang yang masuk ke daerah Pabean Indonesia dicatat sebagai impor baik melalui Kawasan Berikat maupun Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

Data ekspor-impor disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Data yang disajikan mencakup volume maupun nilai, termasuk data yang dirinci menurut komoditi (jenis barang dan kelompok barang), negara tujuan/asal negara, dan pelabuhan muat/bongkar barang.

Bagi pemerintah, statistik ekspor-impor berguna dalam merumuskan kebijakan dan memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, statistik tersebut dipakai pula dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (*Balance of Payment/BOP*). Bagi swasta dan akademisi, statistik tersebut dapat dipakai untuk berbagai analisis dalam penelitian ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impor dilakukan oleh BPS sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Statistical Division (UNSD). Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah pabean ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN.

Sesuai dengan kepentingan dalam spektrum pengguna, data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk:

- a. Ekspor-Impor menurut komoditi yang dikodifikasi dengan *Harmonized System* (HS) dengan dijitasi dari 1, 2, sampai dengan 10 dijit. Selain



kodefikasi tersebut, digunakan juga *The Standard International Trade Classification* (SITC) dengan dijitasi dari 1, 2, dan 3 digit, *International Standard Industrial Classification* (ISIC) serta data impor menurut penggunaan barang (BEC, *Broad Economic Categories*).

- b. Ekspor-Impor menurut negara tujuan/asal.
- c. Ekspor-Impor menurut pelabuhan muat/bongkar.
- d. Ekspor-Impor menurut komoditi dan negara tujuan/asal.
- e. Ekspor-Impor menurut komoditi dan pelabuhan muat/bongkar.
- f. Ekspor-Impor menurut provinsi dan komoditi.

Nilai ekspor secara total untuk periode Januari hingga Juni 2012 sebesar US\$96.884,7 juta.

Menurut status penyajian, data ekspor-impor bulanan dikategorikan menjadi dua:

- a. Angka sementara dirilis sekitar **satu bulan** setelah akhir bulan pencatatan dan diterbitkan setiap bulan.
Contoh: data bulan Juli akan dirilis pada bulan September pada tahun yang sama.
- b. Angka tetap disajikan **dua bulan** setelah akhir bulan pencatatan.
Contoh: data bulan Juli akan dirilis pada bulan Oktober pada tahun yang sama.

Sedangkan data ekspor-impor tahunan dapat diperoleh dalam waktu **tiga bulan** setelah akhir tahun pencatatan. Angka ekspor tahun 2010 dapat diperoleh pada Maret 2011. Di bawah ini disajikan data statistik ekspor-impor pokok yang merupakan salah satu data strategis yang dirilis oleh BPS.

Tabel 4.1.a
Perkembangan Ekspor Indonesia, Januari–Juni 2012*

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)				% Perubahan		% Peran thd Total Ekspor Jan–Jun 2012
	Mei 2012	Juni 2012	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012	Juni 2012 thd Mei 2012	Jan–Jun 2012 thd 2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	16 829,5	15 364,9	98 616,0	96 884,7	-8,70	-1,76	100,00
Migas	3 724,9	2 789,1	19 581,5	20 059,0	-25,12	2,44	20,70
Minyak Mentah	1 112,8	845,3	6 289,0	6 360,8	-24,04	1,14	6,56
Hasil Minyak	385,8	307,5	2 561,3	2 278,9	-20,28	-11,03	2,35
Gas	2 226,3	1 636,3	10 731,2	11 419,3	-26,50	6,41	11,79
Nonmigas	13 104,6	12 575,8	79 034,5	76 825,7	-4,04	-2,79	79,30

Keterangan: *Angka Sementara

Pada Juni 2012 terjadi penurunan nilai ekspor bila dibandingkan Mei 2012 sebesar 8,70 persen (Tabel 4.1.a). Penurunan nilai ekspor tersebut terjadi karena menurunnya nilai ekspor nonmigas sebesar 4,04 persen

demikian juga nilai ekspor migas turun sebesar 25,12 persen. Nilai ekspor secara total untuk periode Januari hingga Juni 2012 sebesar US\$96.884,7 juta yang terdiri dari ekspor migas US\$20.059,0 juta dan ekspor nonmigas US\$76.825,7 juta. Jika dibandingkan dengan periode Januari–Juni tahun 2011 maka terjadi penurunan sebesar 1,76 persen untuk ekspor total. Ekspor migas secara kumulatif (Januari–Juni 2012) naik 2,44 persen, sementara ekspor nonmigas turun 2,79 persen.

Tabel 4.1.b
Perkembangan Impor Indonesia, Januari–Juni 2012^{*)}

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan		% Peran thd Total Impor Jan–Jun 2011
	Mei 2012	Juni 2012 ^{*)}	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012	Juni 2012 ^{*)} thd Mei 2012	Jan–Jun 2012 thd Jan–Jun 2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	17 036,7	16 686,8	83 581,0	96 408,5	-2,05	15,35	100,00
Migas	3 442,1	3 353,3	19 239,9	21 436,7	-2,58	11,42	22,24
Minyak Mentah	784,0	767,2	4 883,8	5 507,6	-2,14	12,77	5,71
Hasil Minyak	2 443,6	2 419,9	13 651,0	14 167,5	-0,97	3,78	14,70
Gas	214,5	166,2	705,1	1 761,6	-22,52	149,84	1,83
Nonmigas	13 594,6	13 333,5	64 341,1	74 971,8	-1,92	16,52	77,76

Keterangan: ^{*)} Angka Sementara

Nilai impor Indonesia selama Juni 2012 mengalami penurunan 2,05 persen dibanding impor Mei 2012.

Dari Tabel 4.1.b. dapat dikemukakan bahwa nilai impor Indonesia selama Juni 2012 mengalami penurunan 2,05 persen dibanding impor Mei 2012, yaitu dari US\$17.036,7 juta menjadi US\$16.686,8 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya impor migas sebesar US\$88,8 juta (2,58 persen), demikian juga dengan impor nonmigas yang menurun sebesar US\$261,1 juta atau 1,92 persen. Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh menurunnya impor minyak mentah dan hasil minyak masing-masing sebesar US\$16,8 juta (2,14 persen) dan US\$23,7 juta (0,97 persen). Sementara itu impor gas menurun sebesar US\$48,3 juta (22,52 persen).

Secara runtun, nilai ekspor-impor migas dan nonmigas dari Juni 2011 sampai dengan Juni 2012 ditampilkan berturut-turut pada Tabel 4.2.a dan Tabel 4.2.b. Data sampai dengan Mei 2012 merupakan angka tetap, sedangkan untuk Juni 2012 masih merupakan angka sementara.

Tabel 4.2.a
Perkembangan Nilai Ekspor Juni 2011–Juni 2012^{*)}

Bulan	Nilai FOB (juta US\$)			Persentase Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011						
Juni	3 591,0	14 795,9	18 386,9	-11,83	4,09	0,54
Juli	3 802,5	13 616,0	17 418,5	5,89	-7,97	-5,27
Agustus	4 091,6	14 556,2	18 647,8	7,60	6,91	7,06
September	3 931,0	13 612,4	17 543,4	-3,93	-6,48	-5,92
Oktober	3 062,7	13 895,0	16 957,7	-22,09	2,08	-3,34
November	3 522,8	13 712,7	17 235,5	15,02	-1,31	1,64
Desember	3 485,0	13 592,7	17 077,7	-1,07	-0,88	-0,92
Jan-Des	41 477,0	162 019,6	203 496,6	47,92	24,88	28,98
2012						
Januari	3 142,6	12 427,5	15 570,1	-9,82	-8,57	-8,83
Februari	3 355,5	12 339,9	15 695,4	6,77	-0,70	0,81
Maret	3 486,1	13 765,4	17 251,5	3,89	11,55	9,91
April	3 560,7	12 612,5	16 173,2	2,14	-8,38	-6,25
Mei	3 724,9	13 104,6	16 829,5	4,61	3,90	4,06
Juni ^{*)}	2 789,1	12 575,8	15 364,9	-25,12	-4,04	-8,70

Keterangan: ^{*)} Angka Sementara

Tabel 4.2.b
Perkembangan Nilai Import Juni 2011–Juni 2012^{*)}

Bulan	Nilai CIF (juta US\$)			Persentase Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011						
Juni	3 244,6	11 827,4	15 072,0	-11,05	5,81	1,66
Juli	3 799,5	12 407,8	16 207,3	17,1	4,91	7,53
Agustus	3 808,5	11 266,9	15 075,4	0,24	-9,2	-6,98
September	3 477,2	11 691,9	15 169,1	-8,7	3,77	0,62
Oktober	3 279,1	12 254,3	15 533,4	-5,7	4,81	2,4
November	3 450,1	11 943,8	15 393,9	5,21	-2,53	-0,9
Desember	3 647,3	12 828,3	16 475,6	5,72	7,41	7,03
Jan-Des	40 701,5	136 734,1	177 435,6	-	-	-
2012						
Januari	3 019,3	11 535,3	14 554,6	-17,22	-10,08	-11,66
Februari	3 492,7	11 374,1	14 866,8	15,68	-1,4	2,15
Maret	4 008,9	12 316,8	16 325,7	14,78	8,29	9,81
April	4 120,4	12 817,5	16 937,9	2,78	4,07	3,75
Mei	3 442,1	13 594,6	17 036,7	-16,46	6,06	0,58
Juni ^{*)}	3 353,3	13 333,5	16 686,8	-2,58	-1,92	-2,05

Keterangan: ^{*)} Angka Sementara

Tabel 4.3.a
Ekspor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Dijit
Januari–Juni 2012^{*)}

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (juta US\$)				Perubahan Juni 2012 thd Mei 2012 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan–Jun 2012
	Mei 2012	Juni 2012 ^{*)}	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Bahan bakar mineral (27)	2 498,8	2 164,0	12 180,4	13 954,7	-334,8	18,16
2. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	1 292,6	1 430,5	10 341,1	10 245,3	137,9	13,34
3. Karet dan barang dari karet (40)	1 113,0	1 053,4	7 593,1	5 762,0	-59,6	7,50
4. Mesin/peralatan listrik (85)	935,3	926,0	5 400,7	5 426,9	-9,3	7,06
5. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	541,4	568,0	2 481,5	3 092,9	26,6	4,03
6. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	531,3	241,0	3 683,7	2 653,5	-290,3	3,45
7. Kendaraan dan bagiannya (87)	381,7	424,3	1 507,3	2 344,4	42,6	3,05
8. Kertas/karton (48)	363,9	342,1	2 111,2	2 025,7	-21,8	2,64
9. Pakaian jadi bukan rajutan (62)	329,3	348,5	2 141,9	1 934,7	19,2	2,52
10. Barang-barang rajutan (61)	315,7	318,6	1 708,4	1 733,8	2,9	2,26
Total 10 Golongan Barang Utama	8 303,0	7 816,4	49 149,3	49 173,9	-486,6	64,01
Lainnya	4 801,6	4 759,4	29 885,2	27 651,8	-42,2	35,99
Total Ekspor Nonmigas	13 104,6	12 575,8	79 034,5	76 825,7	-528,8	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara

Penurunan terbesar pada bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US\$334,8 juta sedangkan peningkatan terbesar ekspor nonmigas Juni 2012 terhadap Mei 2012 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) sebesar US\$137,9 juta. Selama Januari-Juni 2012, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 dijit) memberikan kontribusi 64,01 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 0,05 persen terhadap periode yang sama tahun 2011. Sementara itu, peranan ekspor nonmigas di luar 10 golongan barang pada Januari–Juni 2012 sebesar 35,99 persen. Secara rinci, nilai ekspor sepuluh golongan barang utama dapat dilihat pada Tabel 4.3.a.

Tabel 4.3.b
Impor Nonmigas Sepuluh Golongan Barang Utama HS 2 Dijit Januari–Juni 2012^{*)}

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (juta US\$)				Perubahan Juni 2012 thd Mei 2 012 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan–Jun 2012
	Mei 2012	Juni 2012	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	2 485,2	2 533,5	11 132,8	13 955,8	1,94	18,62
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 643,7	1 707,1	8 562,0	9 471,8	3,86	12,63
3. Besi dan baja (72)	910,5	921,4	4 125,4	5 306,2	1,20	7,08
4. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87)	927,3	911,9	3 397,5	4 936,2	-1,66	6,58
5. Bahan kimia organik (29)	697,3	557,9	3 349,1	3 579,3	-19,99	4,77
6. Plastik dan Barang dari Plastik (39)	676,7	622,4	3 350,1	3 522,5	-8,02	4,70
7. Kapal terbang dan bagiannya (88)	406,9	402,3	1 353,9	2 351,7	-1,13	3,14
8. Barang dari besi dan baja (73)	475,8	392,9	1 610,6	2 308,0	-17,42	3,08
9. Serealialia (10)	223,6	266,3	2 532,6	1 728,7	19,10	2,31
10. Pupuk (31)	299,5	298,6	1 140,8	1 547,0	-0,30	2,06
Total 10 Golongan Barang Utama	8 746,5	8 614,3	40 554,8	48 707,2	-1,51	64,97
Lainnya	4 848,1	4 719,2	23 786,3	26 264,6	-2,66	35,03
Total Impor Nonmigas	13 594,6	13 333,5	64 341,1	74 971,8	-1,92	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara

Dari sepuluh golongan barang utama impor nonmigas Indonesia, empat golongan barang mengalami peningkatan nilai impor pada Juni 2012 dibanding Mei 2012 yaitu golongan mesin dan peralatan listrik sebesar US\$63,4 juta (3,86 persen), mesin dan peralatan mekanik sebesar US\$48,3 juta (1,94 persen), serealialia sebesar US\$42,7 juta (19,10 persen), serta besi dan baja sebesar US\$10,9 juta (1,20 persen). Sementara itu, enam golongan barang lainnya mengalami penurunan.

Dari sepuluh golongan barang utama impor nonmigas Indonesia, empat golongan barang mengalami peningkatan nilai impor pada Juni 2012 dibanding Mei 2012.

Dari enam golongan barang utama yang mengalami penurunan nilai impor, hanya golongan bahan kimia organik yang turun di atas US\$100,0 juta, yaitu sebesar US\$139,4 juta (19,99 persen). Dua golongan barang berikutnya menurun antara US\$50,0 juta sampai dengan US\$100,0 juta, yaitu barang dari besi dan baja sebesar US\$82,9 juta (17,42 persen) serta plastik dan barang dari plastik sebesar US\$54,3 juta (8,02 persen). Sementara itu, tiga golongan barang lainnya menurun di bawah S\$50,0 juta, yaitu kendaraan bermotor dan bagiannya sebesar US\$15,4 juta (1,66 persen), kapal terbang dan bagiannya sebesar US\$4,6 juta (1,13 persen), dan pupuk sebesar US\$0,9 juta (0,30 persen). Secara rinci nilai impor sepuluh golongan barang utama dapat dilihat pada Tabel 4.3.b.

Tabel 4.4.a
Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan Barang Utama
Januari–Juni 2012^{*)}

Negara Tujuan	Nilai FOB (juta US\$)				Perubahan Juni 2012 thd Mei 2012 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan–Jun 2012
	Mei 2012	Juni 2012	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	2 483,1	2 609,9	16 712,2	15 457,1	126,8	20,12
1. Singapura	832,5	929,3	5 620,2	5 059,4	96,8	6,59
2. Malaysia	673,9	690,9	4 948,6	4 474,2	17,0	5,82
3. Thailand	438,2	437,9	2 987,1	2 688,4	-0,3	3,50
ASEAN Lainnya	538,5	551,8	3 156,2	3 235,1	13,3	4,21
Uni Eropa	1 571,3	1 381,5	10 550,7	9 011,3	-189,8	11,73
4. Jerman	245,8	257,9	1 747,9	1 561,3	12,1	2,03
5. Perancis	108,7	99,5	671,9	568,5	-9,2	0,74
6. Inggris	167,7	148,7	852,0	869,2	-19,0	1,13
Uni Eropa Lainnya	1 049,1	875,4	7 278,9	6 012,3	-173,7	7,83
Negara Utama Lainnya	6 981,9	6 387,7	39 410,2	39 842,7	-594,2	51,86
7. Cina	1 850,1	1 566,0	8 955,2	10 447,9	-284,1	13,60
8. Jepang	1 582,4	1 451,6	8 969,4	8 718,9	-130,8	11,35
9. Amerika Serikat	1 341,2	1 314,9	7 901,0	7 457,3	-26,3	9,71
10. India	908,6	845,0	6 638,1	6 036,0	-63,6	7,86
11. Australia	327,7	250,2	1 165,3	1 586,7	-77,5	2,06
12. Korea Selatan	596,2	641,6	3 751,1	3 530,7	45,4	4,59
13. Taiwan	375,7	318,4	2 030,1	2 065,2	-57,3	2,69
Total 13 Negara Utama	9 448,7	8 951,9	56 237,9	55 063,7	-496,8	71,67
Negara Lainnya	3 655,9	3 623,9	22 796,6	21 762,0	-32,0	28,33
Total Ekspor Nonmigas	13 104,6	12 575,8	79 034,5	76 825,7	-528,8	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara

Ekspor nonmigas Indonesia pada Juni 2012 ke Cina, Jepang dan Amerika Serikat masing-masing mencapai US\$1.566,0 juta, US\$1.451,6 juta dan US\$1.314,9 juta, dengan peranan ketiganya mencapai 34,45 persen.

Penurunan ekspor nonmigas Juni 2012 jika dibandingkan dengan Mei 2012 terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, yaitu Cina sebesar US\$284,1 juta; Jepang sebesar US\$130,8 juta; Australia sebesar US\$77,5 juta; India sebesar US\$63,6 juta; Taiwan sebesar US\$57,3 juta; Amerika Serikat sebesar US\$26,3 juta; Inggris sebesar US\$19,0 juta; Perancis sebesar US\$9,2 juta dan Thailand sebesar US\$0,3 juta. Sebaliknya, ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar US\$96,8 juta, diikuti Korea Selatan sebesar US\$45,4 juta; Malaysia sebesar US\$17,0 juta; serta Jerman sebesar US\$12,1 juta. Sementara, ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada Juni 2012 mencapai US\$1.381,5 juta. Secara keseluruhan, total ekspor ketiga belas negara tujuan utama di atas turun 5,26 persen.

Selama periode Januari–Juni 2012, Cina merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai sebesar US\$10.447,9 juta (13,60 persen), diikuti Jepang dengan nilai US\$8.718,9 juta (11,35 persen), dan Amerika Serikat dengan nilai US\$7.457,3 juta (9,71 persen).

Dari total nilai impor nonmigas Indonesia Juni 2012 sebesar US\$13.333,5 juta, sebesar US\$2.797,6 juta (20,98 persen) berasal dari ASEAN, dan sebesar US\$1.227,3 juta (9,20 persen) dari Uni Eropa. Berdasarkan negara asal barang utama, impor nonmigas dari Cina merupakan yang terbesar yaitu sebesar US\$2.595,9 juta atau 19,47 persen dari keseluruhan impor nonmigas Indonesia, diikuti Jepang sebesar US\$2.116,5 juta (15,87 persen), Amerika Serikat US\$1.065,2 juta (7,99 persen), Thailand sebesar US\$1.027,9 juta (7,71 persen), Singapura sebesar US\$960,2 juta (7,20 persen), Korea Selatan sebesar US\$666,7 juta (5,00 persen), Malaysia US\$549,4 juta (4,12 persen), Australia sebesar US\$469,5 juta (3,52 persen), Taiwan US\$389,7 juta (2,92 persen), India sebesar US\$322,4 juta (2,42 persen), dan Jerman sebesar US\$287,9 juta (2,16 persen). Selanjutnya impor nonmigas dari Inggris sebesar US\$161,6 juta (1,21 persen) dan Perancis sebesar US\$130,0 juta (0,97 persen). Secara keseluruhan, ketiga belas negara utama di atas memberikan peran sebesar 80,57 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

ketiga belas negara utama di atas memberikan peran sebesar 80,57 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara itu, dari total nilai impor nonmigas Indonesia selama Januari–Juni 2012 sebesar US\$74.971,8 juta, 81,04 persen berasal dari tiga belas negara utama yaitu Cina sebesar US\$14.493,1 juta atau 19,33 persen, diikuti oleh Jepang sebesar US\$11.776,0 juta (15,71 persen). Berikutnya Thailand berperan 7,68 persen, Amerika Serikat 7,67 persen, Singapura 7,27 persen, Korea Selatan 5,62 persen, Malaysia 4,26 persen, Australia 3,27 persen, India 2,93 persen, Taiwan 2,80 persen, Jerman 2,46 persen, Perancis 1,11 persen, dan Inggris 0,93 persen. Impor Indonesia dari ASEAN mencapai 21,59 persen dan dari Uni Eropa 8,91 persen.

Tabel 4.4.b
 Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Asal Barang Utama
 Januari–Juni 2012^{*)}

Negara Asal	Nilai CIF (juta US\$)				Perubahan Juni 2012 thd Mei 2012 (juta US\$)	% Peran thd Total Nonmigas Jan–Jun 2011
	Mei 2012	Juni 2012	Jan–Jun 2011	Jan–Jun 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASEAN	2 914,7	2 797,6	14 536,2	16 184,7	-4,02	21,59
1. Singapura	908,9	960,2	5 065,0	5 451,4	5,64	7,27
2. Thailand	1 129,1	1 027,9	5 183,5	5 758,1	-8,96	7,68
3. Malaysia	570,7	549,4	2 726,8	3 192,4	-3,73	4,26
ASEAN Lainnya	306,0	260,1	1 560,9	1 782,8	-15,00	2,38
Uni Eropa	1 191,4	1 227,3	5 749,1	6 681,8	3,01	8,91
4. Jerman	349,7	287,9	1 707,2	1 844,6	-17,67	2,46
5. Perancis	183,5	130,0	799,6	831,6	-29,16	1,11
6. Inggris	120,2	161,6	560,0	701,4	34,44	0,93
Uni Eropa Lainnya	538,0	647,8	2 682,3	3 304,2	20,41	4,41
Negara Utama Lainnya	7 839,0	7 625,9	35 602,0	42 975,6	-2,72	57,33
7. Jepang	1 925,6	2 116,5	8 654,2	11 776,0	9,91	15,71
8. Cina	2 791,8	2 595,9	12 049,4	14 493,1	-7,02	19,33
9. Amerika Serikat	1 117,1	1 065,2	5 024,0	5 748,0	-4,65	7,67
10. Korea Selatan	774,9	666,7	3 522,5	4 210,6	-13,96	5,62
11. Australia	403,7	469,5	2 367,3	2 453,3	16,30	3,27
12. Taiwan	375,8	389,7	1 882,7	2 100,5	3,70	2,80
13. India	450,1	322,4	2 101,9	2 194,1	-28,37	2,93
Total 13 Negara Utama	11 101,1	10 742,9	51 644,1	60 755,1	-3,23	81,04
Negara Lainnya	2 493,5	2 590,6	12 697,0	14 216,7	3,89	18,96
Total Impor Nonmigas	13 594,6	13 333,5	64 341,1	74 971,8	-1,92	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara

<http://www.bps.go.id>

5

Ketenagakerjaan

KETENAGAKERJAAN

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei, antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Sakernas dilaksanakan sejak tahun 1976 tetapi sejak tahun 1986 dilakukan secara berkala. Sampai saat ini, Sakernas telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam periode pencacahan, metodologi, maupun cakupan sampel wilayah rumah tangga. Tahun 1994 sampai dengan 2001 Sakernas dilaksanakan secara tahunan, yaitu pada setiap Agustus, kecuali pada tahun 1995, karena data ketenagakerjaan dapat diperoleh dari Supas 1995. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, selain secara tahunan, Sakernas juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 hingga tahun 2010 Sakernas dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester I pada Februari dan semester II pada Agustus. Pada tahun 2005 Sakernas semester II yang seharusnya dilaksanakan pada Agustus terpaksa dilaksanakan pada November karena pada Agustus–Oktober 2005 BPS melaksanakan kegiatan survei yang sangat penting berskala nasional lainnya.

Semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan maka mulai tahun 2011 pengumpulan data Sakernas dilakukan kembali

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV)

secara triwulanan, yaitu Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV) yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Untuk kegiatan Sakernas pada Agustus (Triwulan III) selain dengan sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, dimaksudkan untuk memperoleh angka tahunan sebagai estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Sakernas, BPS merujuk pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992”*.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional. Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja). Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pelaksanaan Sakernas menggunakan konsep/definisi *“bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu”* untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran

Tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada Februari 2012, jumlah angkatan kerja yang merupakan tenaga kerja aktif secara ekonomi mencapai 120,4 juta orang, naik sebesar 3,0 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011 dan naik 1,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.

Pada Februari 2012, jumlah angkatan kerja naik 1,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2011.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian. Sejak Februari 2011 hingga Februari 2012 TPAK mengalami penurunan dari 69,96 persen menjadi 69,66

persen, artinya persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi turun sebesar 0,30 persen poin.

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja, dan juga kecenderungan orang memiliki pekerjaan rangkap.

Pada Februari 2012, dari total angkatan kerja sebesar 120,4 juta orang, sekitar 93,68 persennya adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada Februari 2012 sebesar 112,8 juta orang, bertambah sebanyak 3,1 juta orang (2,86 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2011 dan bertambah sebanyak 1,5 juta orang (1,37 persen) dibandingkan setahun yang lalu (Februari 2011).

Salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*). Jumlah penganggur pada Februari 2012 sebesar 7,6 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 503 ribu orang (6,20 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2011) yang besarnya 8,1 juta orang.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2012 sebesar 6,32 persen, mengalami penurunan sebesar 0,48 persen dibandingkan TPT Februari 2011 yang besarnya 6,80 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2012 sebesar 6,32 persen, mengalami penurunan sebesar 0,48 persen dibandingkan TPT Februari 2011 yang besarnya 6,80 persen.

Tabel 5.1
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan, 2010–2012
 (dalam ribuan)

Kegiatan	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	115 998,06	116 527,55	119 399,37	117 370,49	120 417,05
Bekerja	107 405,57	108 207,77	111 281,74	109 670,40	112 802,81
Penganggur	8 592,49	8 319,78	8 117,63	7 700,09	7 614,24
Bukan Angkatan Kerja	55 019,35	55 542,79	51 256,76	54 385,59	52 448,92
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,83	67,72	69,96	68,34	69,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,41	7,14	6,80	6,56	6,32
Pekerja Tidak Penuh	32 802,94	33 269,34	34 194,26	34 588,09	35 550,53
Setengah Penganggur	15 272,94	15 258,76	15 736,48	13 524,05	14 868,99
Pekerja Paruh Waktu	17 530,00	18 010,58	18 457,79	21 064,03	20 681,55

2. Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasarkan lapangan pekerjaan pada Februari 2012, dari 112,8 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di Sektor Pertanian, yaitu 41,2 juta orang (36,52 persen), disusul Sektor Perdagangan sebesar 24,0 juta orang (21,30 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 17,4 juta orang (15,40 persen).

Dalam setahun terakhir, terjadi kenaikan jumlah penduduk bekerja hampir di semua sektor, kecuali Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan Sektor Pertanian yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,81 persen dan 3,01 persen. Sektor yang mengalami peningkatan persentase pekerja paling tinggi, yaitu Sektor Keuangan sebesar 3 4,95 persen.

Peran Sektor Pertanian dalam ketenagakerjaan masih terbesar, namun demikian kontribusinya dari waktu ke waktu semakin menurun.

3. Status Pekerjaan Utama

Kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat didefinisikan berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di sektor formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya

Tabel 5.2
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2010–2012
(juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,83	41,49	42,48	39,33	41,20
Industri	13,05	13,82	13,70	14,54	14,21
Konstruksi	4,84	5,59	5,59	6,34	6,10
Perdagangan	22,21	22,49	23,24	23,40	24,02
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	5,82	5,62	5,58	5,08	5,20
Keuangan	1,64	1,74	2,06	2,63	2,78
Jasa Kemasyarakatan	15,62	15,96	17,02	16,65	17,37
Lainnya *)	1,40	1,50	1,61	1,70	1,92
T o t a l	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

¹⁾ Mencakup: 1. Pertambangan dan Penggalian; 2. Listrik, Gas, dan Air Bersih

termasuk yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2012 sekitar 42,1 juta orang (37,29 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,7 juta orang (62,71 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Dalam setahun terakhir, penduduk yang bekerja di sektor formal bertambah sebesar 4,0 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor informal berkurang sebesar 2,4 juta orang.

Dalam setahun terakhir, penduduk yang bekerja di sektor formal bertambah sebesar 4,0 juta orang dengan persentase yang meningkat dari 34,24 persen pada Februari 2011 menjadi 37,29 persen pada Februari 2012. Di sisi lain, penduduk yang bekerja di sektor informal berkurang sebesar 2,4 juta orang dengan persentase menurun dari 65,76 persen pada Februari 2011 menjadi 62,71 persen pada Februari 2012. Penurunan ini berasal dari hampir seluruh komponen penduduk yang bekerja di sektor informal, kecuali pekerja bebas di nonpertanian.

4. Penduduk yang Bekerja dan Penganggur Menurut Provinsi

Pada Februari 2012, angkatan kerja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 69,7 juta jiwa (57,89 persen), sementara sisanya yang sebesar 50,7 juta jiwa (42,11 persen) tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 5.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, 2010–2012
(juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	20,46	21,03	21,15	19,41	19,54
Berusaha dengan Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar	21,92	21,68	21,31	19,66	20,37
Berusaha dengan Buruh Tetap/ Dibayar	3,02	3,26	3,59	3,72	3,93
Pekerja/Buruh/Karyawan	30,72	32,52	34,51	37,77	38,13
Pekerja Bebas di Pertanian	6,32	5,82	5,58	5,48	5,36
Pekerja Bebas di Nonpertanian	5,28	5,13	5,16	5,64	5,97
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	19,68	18,77	19,98	17,99	19,50
Total	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

Tiga provinsi dengan TPT tertinggi pada Februari 2011 yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur secara berurut sebesar 13,50 persen, 10,83 persen, dan 10,21 persen. Setahun kemudian (Februari 2012) terjadi perubahan posisi di mana tiga provinsi dengan TPT tertinggi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang masing-masing sebesar 10,74 persen, 10,72 persen, dan 9,78 persen. Akan tetapi jika dilihat dari besaran absolutnya pada Februari 2012, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi dengan jumlah pengangguran paling besar yaitu 1,9 juta jiwa, 1,0 juta jiwa, dan 819,5 ribu jiwa.

Pada Februari 2012, tiga provinsi dengan TPT tertinggi adalah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, yaitu sebesar 10,74 persen, 10,72 persen, dan 9,78 persen.

Tabel 5.4
Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, Pengangguran, dan
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari 2011–Februari 2012

Provinsi	Angkatan Kerja (juta)		Bekerja (juta)		Pengangguran (ribu)		Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	
	Feb 2011	Feb 2012	Feb 2011	Feb 2012	Feb 2011	Feb 2012	Feb 2011	Feb 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	2,07	2,09	1,90	1,92	171,05	164,41	8,27	7,88
Sumatera Utara	6,41	6,56	5,95	6,14	460,62	413,64	7,18	6,31
Sumatera Barat	2,28	2,35	2,11	2,20	162,49	146,97	7,14	6,25
Riau	2,59	2,62	2,41	2,49	185,91	135,64	7,17	5,17
Jambi	0,84	0,89	0,78	0,84	58,88	52,28	7,04	5,87
Sumatera Selatan	1,53	1,55	1,47	1,49	58,80	56,61	3,85	3,65
Bengkulu	3,76	3,93	3,53	3,71	228,08	219,78	6,07	5,59
Lampung	0,61	0,62	0,59	0,60	19,72	17,14	3,25	2,78
Kepulauan Bangka Belitung	0,89	0,91	0,86	0,89	30,45	19,59	3,41	2,14
Kepulauan Riau	3,85	3,93	3,65	3,73	201,48	201,27	5,24	5,12
DKI Jakarta	5,01	5,28	4,47	4,72	542,71	566,51	10,83	10,72
Jawa Barat	20,16	20,14	18,17	18,17	1 982,45	1 969,01	9,84	9,78
Jawa Tengah	5,16	5,40	4,47	4,82	697,08	579,68	13,50	10,74
DI Yogyakarta	17,18	17,12	16,14	16,12	1 042,50	1 006,47	6,07	5,88
Jawa Timur	1,96	1,93	1,85	1,85	107,12	78,80	5,47	4,09
Banten	20,25	19,83	19,41	19,01	845,65	819,46	4,18	4,13
Bali	2,30	2,31	2,23	2,26	65,60	48,59	2,86	2,11
Nusa Tenggara Barat	2,17	2,18	2,06	2,07	116,41	113,64	5,35	5,21
Nusa Tenggara Timur	2,23	2,27	2,18	2,21	59,66	54,14	2,67	2,39
Kalimantan Barat	2,26	2,26	2,14	2,18	112,53	75,76	4,99	3,36
Kalimantan Tengah	1,14	1,16	1,09	1,13	41,60	31,42	3,66	2,71
Kalimantan Selatan	1,84	1,89	1,74	1,81	103,50	81,49	5,62	4,32
Kalimantan Timur	1,71	1,83	1,54	1,66	174,81	170,14	10,21	9,29
Sulawesi Utara	1,07	1,11	0,97	1,02	98,23	92,72	9,19	8,32
Sulawesi Tengah	0,46	0,47	0,44	0,45	21,12	22,64	4,81	4,81
Sulawesi Selatan	1,31	1,35	1,25	1,30	55,81	50,47	4,27	3,73
Sulawesi Tenggara	3,63	3,64	3,39	3,41	243,02	235,25	6,69	6,46
Gorontalo	0,57	0,56	0,56	0,55	15,51	11,64	2,70	2,07
Sulawesi Barat	1,06	1,09	1,02	1,06	46,23	33,91	4,34	3,10
Maluku	0,69	0,68	0,64	0,64	53,49	48,71	7,72	7,11
Maluku Utara	0,48	0,47	0,45	0,45	26,84	25,01	5,62	5,31
Papua Barat	1,56	1,59	1,50	1,55	57,88	46,23	3,72	2,90
Papua	0,37	0,38	0,34	0,36	30,42	25,25	8,28	6,57
Indonesia	119,40	120,41	111,28	112,80	8 117,63	7 614,24	6,80	6,32

<http://www.bps.go.id>

6

Produksi Tanaman Pangan

PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Penghitungan produksi tanaman pangan secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

Penghitungan produksi tanaman pangan secara nasional dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Data pokok yang dikumpulkan untuk bahan penghitungan produksi tanaman pangan adalah data luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Penyajian data produksi tanaman pangan tahun tertentu dilakukan sebanyak lima kali dengan status angka yang berbeda, yaitu Angka Ramalan I (ARAM I), Angka Ramalan II (ARAM II), Angka Ramalan III (ARAM III), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP).

Tujuan penyediaan data produksi tanaman pangan secara berkesinambungan adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Diharapkan data tersebut dapat digunakan untuk bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.

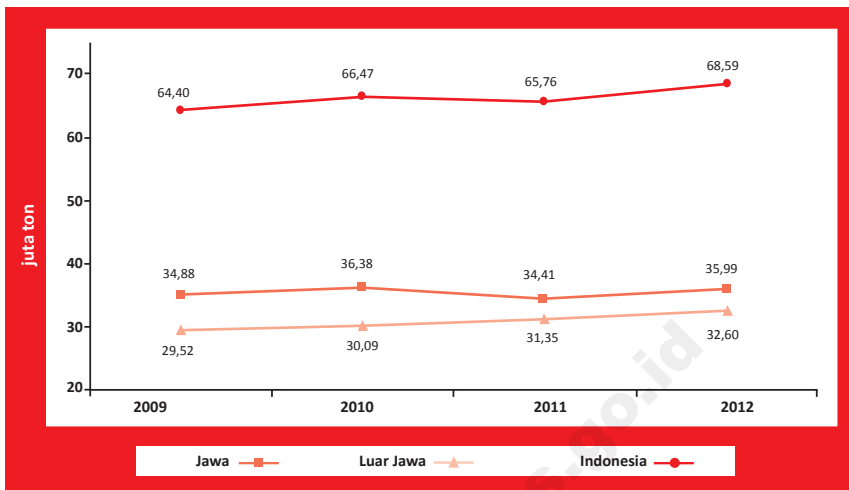
1. Produksi Padi

Produksi padi tahun 2011 (ATAP) sebesar 65,76 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau turun sebanyak 0,71 juta ton (1,07 persen) dibandingkan tahun 2010. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 1,97 juta ton sedangkan di luar Jawa mengalami peningkatan sebesar 1,26 juta ton.

Produksi padi tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 68,59 juta ton GKG atau meningkat sebanyak 2,84 juta ton (4,31 persen) dibandingkan tahun 2011.

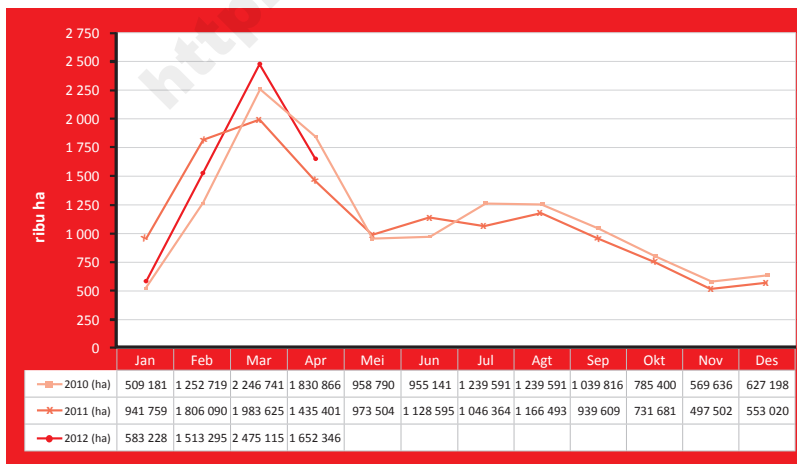
Produksi padi tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 68,59 juta ton GKG atau meningkat sebanyak 2,84 juta ton (4,31 persen) dibandingkan tahun 2011. Kenaikan produksi ini diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 1,59 juta ton dan di luar Jawa sebesar 1,25 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena adanya perkiraan peningkatan luas panen seluas 237,30 ribu hektar (1,80 persen) dan produktivitas sebesar 1,23 kuintal/hektar, ku/ha, (2,47 persen). Perkiraan kenaikan produksi padi tahun 2012 yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Sedangkan perkiraan penurunan produksi padi tahun 2012 yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.

Gambar 6.1
Perkembangan Produksi Padi, 2009–2012¹⁾



Pola panen padi tahun 2012 relatif sama dengan pola panen tahun 2010 dan 2011. Pada subround Januari–April tahun 2010, 2011, dan tahun 2012, panen mencapai puncaknya pada bulan Maret (Gambar 6.2).

Gambar 6.2
Pola Panen Padi, 2010–2012



Tabel 6.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Menurut Subround, 2010–2012

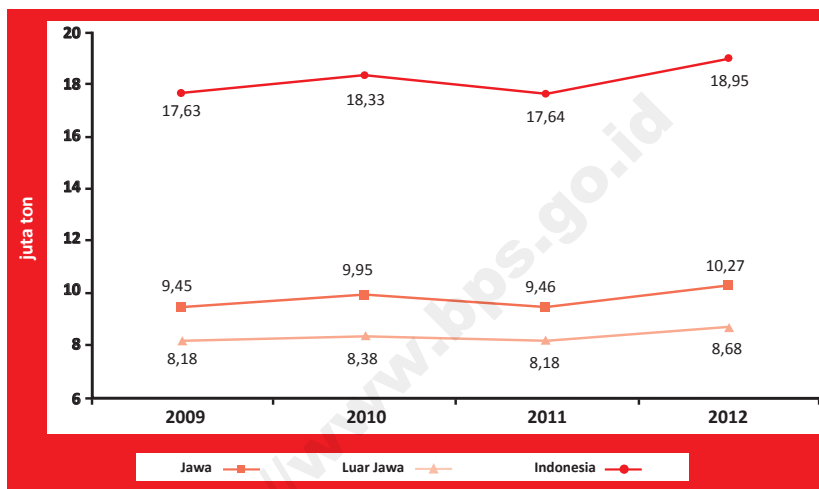
Uraian	2010	2011	2012 (ARAM I)	Perkembangan			
				2010–2011		2011–2012	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
• Januari–April	5 839 507	6 166 875	6 223 984	327 368	5,61	57 109	0,93
• Mei–Agustus	4 391 893	4 314 956	4 400 710	-76 937	-1,75	85 754	1,99
• September–Desember	3 022 050	2 721 812	2 816 246	-300 238	-9,93	94 434	3,47
• Januari–Desember	13 253 450	13 203 643	13 440 940	-49 807	-0,38	237 297	1,80
2 Produktivitas (ku/ha)							
• Januari–April	50,22	49,67	51,53	-0,55	-1,10	1,86	3,74
• Mei–Agustus	50,44	48,88	50,75	-1,56	-3,09	1,87	3,83
• September–Desember	49,61	51,57	50,38	1,96	3,95	-1,19	-2,31
• Januari–Desember	50,15	49,80	51,03	-0,35	-0,70	1,23	2,47
3 Produksi (ton)							
• Januari–April	29 323 792	30 629 008	32 070 722	1 305 216	4,45	1 441 714	4,71
• Mei–Agustus	22 152 985	21 090 832	22 334 719	-1 062 153	-4,79	1 243 887	5,90
• September–Desember	14 992 617	14 037 064	14 188 626	-955 553	-6,37	151 562	1,08
• Januari–Desember	66 469 394	65 756 904	68 594 067	-712 490	-1,07	2 837 163	4,31

Keterangan: kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Produksi Jagung

Produksi jagung tahun 2011 (ATAP) sebesar 17,64 juta ton pipilan kering atau turun sebanyak 684,39 ribu ton (3,73 persen) dibandingkan tahun 2010. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 477,29 ribu ton dan di luar Jawa sebesar 207,10 ribu ton.

Gambar 6.3
Perkembangan Produksi Jagung, 2009–2012 ¹⁾



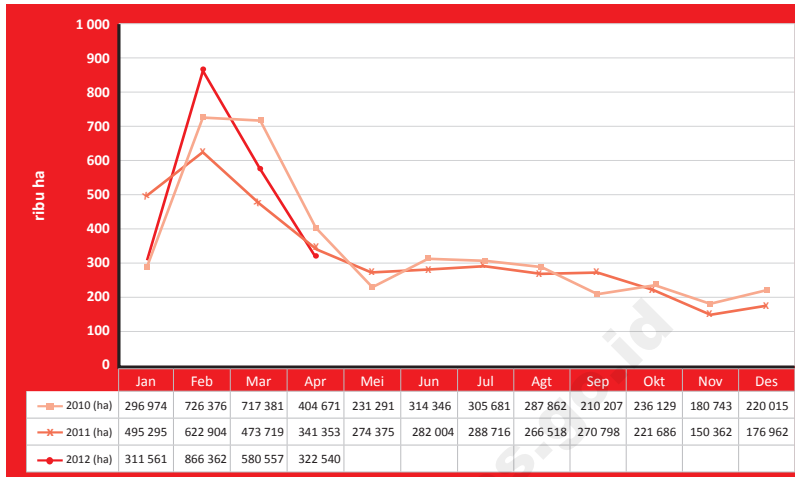
Keterangan: ¹⁾ Tahun 2012 adalah ARAM I

Produksi jagung tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 18,95 juta ton pipilan kering atau mengalami peningkatan sebanyak 1,30 juta ton (7,38 persen) dibandingkan tahun 2011. Peningkatan produksi ini diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 0,80 juta ton dan di luar Jawa sebesar 0,51 juta ton. Peningkatan produksi terjadi karena adanya perkiraan peningkatan luas panen seluas 132,78 ribu hektar (3,44 persen) dan produktivitas sebesar 1,74 kuintal/hektar (3,81 persen). Perkiraan peningkatan produksi jagung tahun 2012 yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DI Yogyakarta. Sedangkan perkiraan penurunan produksi jagung tahun 2012 yang relatif besar terdapat di Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Banten, dan Riau.

Pola panen jagung tahun 2012 relatif sama dengan pola panen tahun 2010 dan 2011. Pada subround Januari–April tahun 2010, 2011, dan 2012, puncak panen terjadi pada Februari (Gambar 6.4).

Produksi jagung tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 18,95 juta ton pipilan kering atau mengalami peningkatan sebanyak 1,30 juta ton (7,38 persen) dibandingkan tahun 2011.

Gambar 6.4
Pola Panen Jagung, 2010–2012



Tabel 6.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung
Menurut Subround, 2010–2012

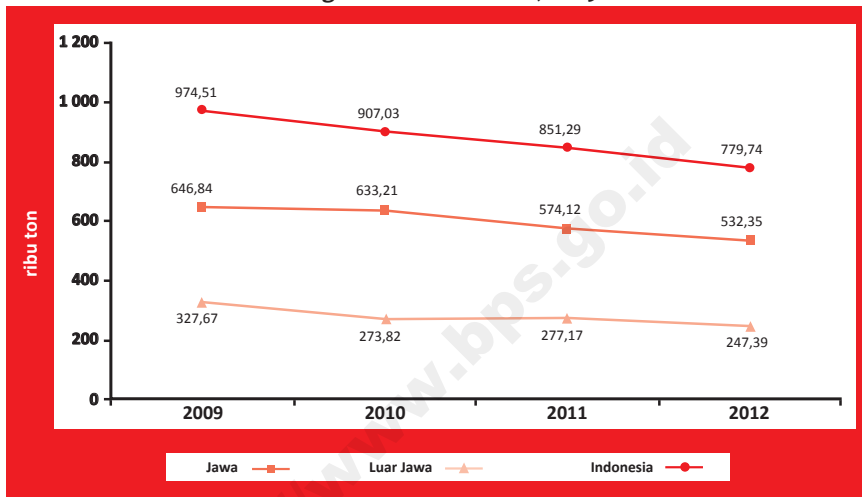
Uraian	2010	2011	2012 (ARAM I)	Perkembangan			
				2010–2011		2011–2012	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
• Januari–April	2 145 402	1 933 271	2 080 984	-212 131	-9,89	147 713	7,64
• Mei–Agustus	1 139 180	1 111 613	1 046 681	-27 567	-2,42	-64 932	-5,84
• September–Desember	847 094	819 808	869 806	-27 286	-3,22	49 998	6,10
• Januari–Desember	4 131 676	3 864 692	3 997 471	-266 984	-6,46	132 779	3,44
2 Produktivitas (ku/ha)							
• Januari–April	42,29	41,87	46,42	-0,42	-0,99	4,55	10,87
• Mei–Agustus	45,26	46,01	46,91	0,75	1,66	0,90	1,96
• September–Desember	48,39	54,10	50,30	5,71	11,80	-3,80	-7,02
• Januari–Desember	44,36	45,65	47,39	1,29	2,91	1,74	3,81
3 Produksi (ton)							
• Januari–April	9 072 681	8 094 067	9 660 561	-978 614	-10,79	1 566 494	19,35
• Mei–Agustus	5 155 916	5 114 140	4 909 755	-41 776	-0,81	-204 385	-4,00
• September–Desember	4 099 039	4 435 043	4 374 808	336 004	8,20	-60 235	-1,36
• Januari–Desember	18 327 636	17 643 250	18 945 124	-684 386	-3,73	1 301 874	7,38

Keterangan: kualitas produksi jagung adalah pipilan kering

3. Produksi Kedelai

Produksi kedelai tahun 2011 (ATAP) sebesar 851,29 ribu ton biji kering atau menurun sebanyak 55,74 ribu ton (6,15 persen) dibandingkan tahun 2010. Penurunan produksi tersebut terjadi di Jawa sebesar 59,09 ribu ton, sedangkan di luar Jawa mengalami peningkatan sebesar 3,35 ribu ton.

Gambar 6.5
Perkembangan Produksi Kedelai, 2009–2011¹⁾



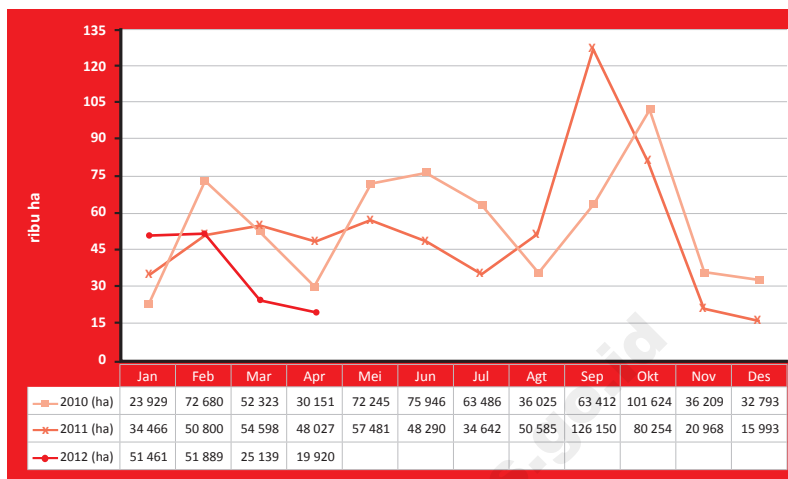
Keterangan: ¹⁾ Tahun 2012 adalah ARAM I

Produksi kedelai tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 779,74 ribu ton biji kering atau menurun sebanyak 71,55 ribu ton (8,40 persen) dibandingkan tahun 2011. Penurunan produksi ini diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 41,77 ribu ton dan di luar Jawa sebesar 29,78 ribu ton. Penurunan produksi kedelai terjadi karena adanya perkiraan penurunan luas panen seluas 55,56 ribu hektar (8,93 persen). Sebaliknya produktivitas diperkirakan akan meningkat sebesar 0,08 kuintal/hektar (0,58 persen). Perkiraan penurunan produksi kedelai tahun 2012 yang relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Lampung. Sedangkan perkiraan kenaikan produksi kedelai tahun 2012 terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Banten.

Pola panen kedelai Januari-Desember, pada tahun 2010 dan tahun 2011 masing-masing pada Oktober dan September. Pola panen kedelai tahun 2012 mendekati pola panen tahun 2010 dibanding dengan tahun 2011. Pada subround Januari–April tahun 2012 dan tahun 2010, puncak panen terjadi pada Februari, sedangkan pada tahun 2011, panen kedelai mencapai puncaknya pada Maret (Gambar 6.6).

Produksi kedelai tahun 2012 (ARAM I) diperkirakan sebesar 779,74 ribu ton biji kering atau menurun sebanyak 71,55 ribu ton (8,40 persen) dibandingkan tahun 2011.

Gambar 6.6
Pola Panen Kedelai, 2010–2012



Tabel 6.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai
Menurut Subround, 2010–2012

Uraian	2010	2011	2012 (ARAM I)	Perkembangan			
				2010–2011		2011–2012	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Luas Panen (ha)							
• Januari–April	179 083	187 891	148 409	8 808	4,92	-39 482	-21,01
• Mei–Agustus	247 702	190 998	187 319	-56 704	-22,89	-3 679	-1,93
• September–Desember	234 038	243 365	230 965	9 327	3,99	-12 400	-5,10
• Januari–Desember	660 823	622 254	566 693	-38 569	-5,84	-55 561	-8,93
2 Produktivitas (ku/ha)							
• Januari–April	13,89	13,24	14,47	-0,65	-4,68	1,23	9,29
• Mei–Agustus	13,22	13,14	13,33	-0,08	-0,61	0,19	1,45
• September–Desember	14,14	14,44	13,65	0,30	2,12	-0,79	-5,47
• Januari–Desember	13,73	13,68	13,76	-0,05	-0,36	0,08	0,58
3 Produksi (ton)							
• Januari–April	248 795	248 830	214 736	35	0,01	-34 094	-13,70
• Mei–Agustus	327 379	250 921	249 675	-76 458	-23,35	-1 246	-0,50
• September–Desember	330 857	351 535	315 330	20 678	6,25	-36 205	-10,30
• Januari–Desember	907 031	851 286	779 741	-55 745	-6,15	-71 545	-8,40

Keterangan: Kualitas produksi kedelai adalah biji kering

Tabel 6.4
Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai
Menurut Provinsi, 2011–2012
(ton)

Provinsi	Padi		Jagung		Kedelai	
	2011	2012 (ARAM I)	2011	2012 (ARAM I)	2011	2012 (ARAM I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	1 772 962	1 899 917	168 861	148 525	50 006	57 016
2. Sumatera Utara	3 607 403	3 633 298	1 294 645	1 349 874	11 426	6 694
3. Sumatera Barat	2 279 602	2 331 009	471 849	473 712	1 925	1 551
4. R i a u	535 788	496 538	33 197	31 998	7 100	5 259
5. Kepulauan Riau	1 223	1 244	923	909	7	12
6. J a m b i	646 641	684 666	25 521	37 470	5 668	5 906
7. Sumatera Selatan	3 384 670	3 587 926	125 688	121 666	13 710	10 537
8. Kepulauan Bangka Belitung	15 211	27 004	850	1 393	1	1
9. Bengkulu	502 552	552 910	87 362	133 134	3 458	4 094
10. Lampung	2 940 795	3 084 781	1 817 906	1 825 292	10 984	7 600
11. DKI Jakarta	9 516	10 143	23	11	–	–
12. Jawa Barat	11 633 891	11 531 479	945 104	959 879	56 166	46 197
13. Banten	1 949 714	1 937 494	13 863	12 320	5 885	6 785
14. Jawa Tengah	9 391 959	9 909 668	2 772 575	2 981 460	112 273	136 076
15. DI Yogyakarta	842 934	909 340	291 596	356 989	32 795	33 123
16. Jawa Timur	10 576 543	11 693 895	5 443 705	5 952 268	366 999	310 170
17. B a l i	858 316	850 422	64 606	67 209	8 503	8 512
18. Nusa Tenggara Barat	2 067 137	2 050 526	456 915	634 297	88 099	71 296
19. Nusa Tenggara Timur	591 371	686 008	524 638	625 544	1 378	2 447
20. Kalimantan Barat	1 372 988	1 415 854	160 819	169 775	2 027	2 069
21. Kalimantan Tengah	610 236	653 914	9 208	9 345	2 823	2 118
22. Kalimantan Selatan	2 038 309	2 064 535	99 779	109 719	4 376	3 594
23. Kalimantan Timur	552 616	577 477	7 341	7 814	2 281	1 662
24. Sulawesi Utara	596 223	618 827	438 504	447 425	6 319	3 008
25. Gorontalo	273 921	264 222	605 782	661 788	2 156	3 191
26. Sulawesi Tengah	1 041 789	1 123 302	161 810	142 337	6 900	6 306
27. Sulawesi Selatan	4 511 705	4 747 910	1 420 154	1 458 412	33 716	31 867
28. Sulawesi Barat	365 683	389 472	82 995	92 583	2 433	2 453
29. Sulawesi Tenggara	491 567	548 567	67 997	80 889	6 113	4 380
30. Maluku	87 468	104 110	13 875	15 551	297	276
31. Maluku Utara	61 430	63 988	26 149	26 756	1 100	1 132
32. Papua	115 437	111 252	6 885	6 812	3 959	3 786
33. Papua Barat	29 304	32 369	2 125	1 968	403	623
Jawa	34 404 557	35 992 019	9 466 866	10 262 927	574 118	532 351
Luar Jawa	31 352 347	32 602 048	8 176 384	8 682 197	277 168	247 390
Indonesia	65 756 904	68 594 067	17 643 250	18 945 124	851 286	779 741

<http://www.bps.go.id>

7

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur

PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR

1. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*q-to-q*) Tahun 2010–2012

Mengingat pentingnya peran sektor Industri pengolahan terhadap PDB Nasional, maka diperlukan indikator dini untuk mengamati perkembangan industri manufaktur. Salah satu indikator tersebut adalah pertumbuhan produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang (IBS).

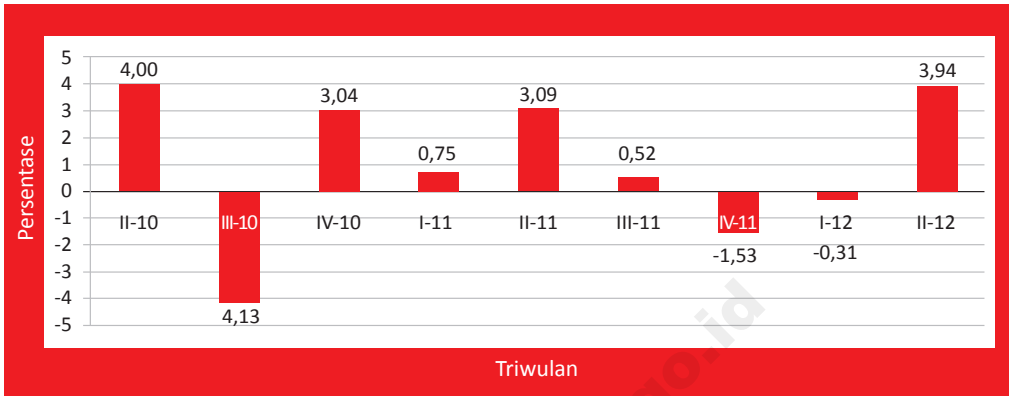
Pemerintah sampai saat ini terus melakukan upaya-upaya dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai wujud dari upaya tersebut, pemerintah terus berperan aktif sebagai fasilitator dan dinamisator dalam menciptakan iklim usaha yang makin kondusif melalui penetapan berbagai kebijakan ekonomi yang harus berdampak positif terhadap sektor riil maupun moneter. Mengingat pentingnya peran sektor industri manufaktur terhadap PDB nasional, maka diperlukan indikator dini untuk mengamati perkembangan industri manufaktur. Salah satu indikator tersebut adalah pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS).

Selama tahun 2010–2012 Industri manufaktur besar dan sedang triwulanan (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan triwulan II-2012 naik sebesar 3,94 persen dari triwulan I-2012, triwulan I-2012 turun sebesar 0,31 persen dari triwulan IV-2011, triwulan IV-2011 turun sebesar 1,53 persen dari triwulan III-2011, triwulan III-2011 naik sebesar 0,52 persen dari triwulan II-2011, triwulan II-2011 naik sebesar 3,09 persen dari triwulan I-2011, triwulan I-2011 naik sebesar 0,75 persen dari triwulan IV-2010, triwulan IV-2010 naik sebesar 3,04 persen dari triwulan III-2010, triwulan III-2010 turun sebesar 4,13 persen dari triwulan III-2010, dan triwulan II-2010 naik sebesar 4,00 persen dari triwulan III-2010. Triwulan dua pada tahun 2010 dan 2011 memiliki kecenderungan naik jika dibandingkan dengan triwulan triwulan lain pada tahun tersebut.

Tabel 7.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan Tahun 2010–2012

Tahun	Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)				Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)				Tahunan
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2010		4,00	-4,13	3,04					
2011	0,75	3,09	0,52	-1,53	3,51	2,60	7,57	2,80	4,10
2012	-0,31	3,94			1,72	2,55			

Gambar 7.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q)
2010–2012

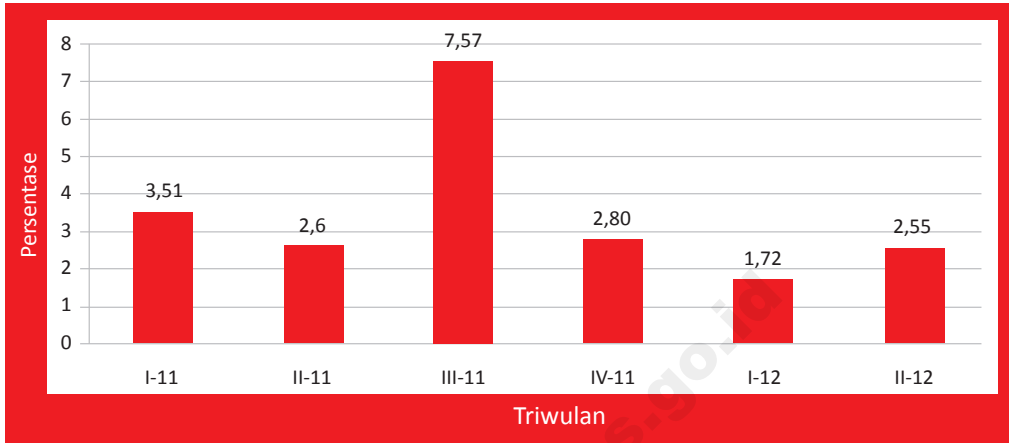


2. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (y-on-y)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulanan (y-on-y) dari tahun 2010–2012 juga berfluktuasi. Triwulan I tahun 2011 naik sebesar 3,51 persen dari triwulan I tahun 2010, triwulan II tahun 2011 naik sebesar 2,60 persen dari triwulan II tahun 2010, triwulan III tahun 2011 naik sebesar 7,57 persen dari triwulan III tahun 2010, triwulan IV tahun 2011 naik sebesar 2,80 persen dari triwulan IV tahun 2010. Secara umum, pertumbuhan produksi manufaktur tahun 2011 mengalami kenaikan 4,10 persen dari tahun sebelumnya. Triwulan I tahun 2012 naik sebesar 1,72 persen dari triwulan IV tahun 2011 dan triwulan II tahun 2012 naik sebesar 2,55 persen dari triwulan sebelumnya.

*Pertumbuhan
 Produksi Industri
 Manufaktur Besar
 dan Sedang triwulan
 II tahun 2012 naik
 sebesar 2,55 persen
 dari triwulan II
 tahun 2011.*

Gambar 7.2
 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (y-to-y)
 2010–2012



3. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan (m-to-m)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang setiap bulan pada tahun 2010 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pertumbuhan produksi pada September yang mengalami penurunan sebesar 8,70 persen dari bulan sebelumnya, dan kemudian mengalami kenaikan sampai 9,15 persen pada Oktober 2010. Pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada Maret 2011, yaitu sebesar 7,95 persen jika di bandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan Agustus dan November 2011 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 5,80 dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada Januari tahun 2012 turun sebesar 0,13 persen (*m-to-m*) dari Desember tahun 2011, pertumbuhan Februari tahun 2012 naik 2,80 persen dari Januari 2012, pertumbuhan Maret 2012 turun sebesar 3,00 persen dari Februari 2012, pertumbuhan April 2012 naik 1,06 persen dari Maret 2012, pertumbuhan Mei naik 6,01 persen dari April 2012, pertumbuhan Juni turun sebesar 0,01 persen dari Mei 2012. Tabel 7.2 memperlihatkan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang setiap bulan dari Januari 2010 sampai dengan Mei 2012.

Tabel 7.2
 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan
 Januari 2010–Juni 2012

Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2010	-3,41	0,72	4,20	0,07	-0,53	3,79	-3,61	0,18	-8,70	9,15	0,95	-0,88
2011	0,83	-3,54	7,95	-3,47	3,37	1,52	2,07	-5,80	0,99	3,33	-5,80	-1,53
2012	-0,13	2,80	-3,00	1,06	6,01	-0,01						

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Kemiskinan

KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen yang baik bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976–1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap Februari atau Maret. Sebagai informasi tambahan, digunakan pula hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan proporsi pengeluaran masing-masing komoditi pokok nonmakanan.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1998–2012

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun selama periode 1998–2012 (Tabel 1). Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada melonjaknya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun, angka kemiskinan juga menurun. Selama periode 1999–2002 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 9,57 juta orang dari 47,97 juta orang (23,43 persen dari total penduduk) menjadi 38,4 juta orang (18,2 persen dari total penduduk). Angka kemiskinan terus menurun dan mencapai 35,1 juta orang (15,97 persen dari total penduduk) pada tahun 2005. Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak pada tahun 2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar, kemiskinan tercatat meningkat menjadi 17,75 persen (39,3 juta orang) pada tahun 2006, atau meningkat sebanyak 4,2 juta orang dibanding tahun 2005.

Meskipun demikian selama periode 2007–2012, angka kemiskinan kembali turun. Pada tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen). Beberapa program pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), turun 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang, turun 0,89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang.

Tabel 8.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah
1998–2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011 (Mar)	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
2011 (Sep)	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
2012 (Mar)	10,65	18,48	29,13	8,78	15,12	11,96

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012

Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang (0,45 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 0,89 juta orang. Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 399,5 ribu orang (0,45 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (0,60 persen) Tabel 8.2.

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Maret 2011-Maret 2012 adalah:

- Upah harian (nominal) buruh tani dan buruh bangunan meningkat selama periode triwulan I-2011 dan triwulan I-2012, yaitu masing-masing sebesar 2,96 persen dan 4,81 persen.
- Penerima beras murah/raskin (dalam 3 bulan terakhir) pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah meningkat dari 13,3 persen (tahun 2011) menjadi 17,2 persen (tahun 2012) di perkotaan. Begitu juga di daerah perdesaan terjadi peningkatan dari

- 13,3 persen menjadi 17,2 persen (berdasarkan data Susenas 2011 dan Susenas 2012).
- c. Penerima pelayanan kesehatan gratis selama 6 bulan terakhir (pada 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012 (4,6 persen menjadi 5,6 persen) di perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, penerima pelayanan kesehatan gratis di kelompok tersebut meningkat (berdasarkan Susenas 2011 dan Susenas 2012) dari 3,9 persen pada tahun 2011 dan 4,7 persen pada tahun 2012.
 - d. Selama periode Maret 2011–Maret 2012 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,97 persen.
 - e. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,32 persen dari 103,32 pada Maret 2011 menjadi 104,68 pada Maret 2012.
 - f. Perekonomian Indonesia triwulan I-2012 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap triwulan I-2011, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen pada periode yang sama (pertumbuhan pada tahun 2011 hanya mencapai 3,6 persen).
 - g. Dari sisi ukuran subyektif (*subjective measurement*), persentase rumah tangga di kuantil terbawah (20 persen penduduk dengan pendapatan terendah) yang menyatakan bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dalam sebulan terakhir meningkat dari 8,1 persen (tahun 2011) menjadi 12,4 persen (tahun 2012) di daerah perkotaan. Di daerah perdesaan meningkat dari 8,5 persen (tahun 2011) menjadi 11,0 persen (tahun 2012).

Tabel 8.2
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2011–Maret 2012

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2011	177 342	75 674	253 016	11,05	9,23
Maret 2012	187 194	80 213	267 408	10,65	8,78
Perdesaan					
Maret 2011	165 211	48 184	213 395	18,97	15,72
Maret 2012	177 521	51 705	229 226	18,48	15,12
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2011	171 834	61 906	233 740	30,02	12,49
Maret 2012	182 796	65 910	248 707	29,13	11,96

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2011 dan Maret 2012

Selama Maret 2010–Maret 2011, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,39 persen, yaitu dari Rp211.726,- menjadi Rp233.740,- per kapita per bulan.

3. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2011–Maret 2012

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selama Maret 2011–Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,40 persen, yaitu dari Rp233.740,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp248.707,- per kapita per bulan pada Maret 2012. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2011 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,52 persen, dan sekitar 73,50 persen pada Maret 2012.

Pada Maret 2012, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras yaitu sebesar 29,23 persen di perkotaan dan 35,61 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (8,13 persen di perkotaan dan 7,07 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,41 persen di perkotaan dan 2,62 persen di perdesaan), gula pasir (2,63 persen di perkotaan dan 3,68 di perdesaan), tempe (2,26 persen di perkotaan dan 1,77 persen di perdesaan), tahu (2,00 persen di perkotaan dan 1,43 persen di perdesaan), mie instan (1,65 persen di perkotaan dan 2,26 persen di perdesaan), dan bawang merah (1,33 persen di perkotaan dan 1,56 persen di perdesaan).

Komoditi bukan makanan pada Maret 2012 yang memberi sumbangan besar untuk Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (10,32 persen di perkotaan dan 7,16 persen di perdesaan), biaya listrik (2,32 persen di perkotaan dan 2,06 persen di perdesaan), biaya pendidikan (2,88 persen di perkotaan dan 1,64 persen di perdesaan), dan bensin (1,93 persen di perkotaan dan 1,71 persen di perdesaan).

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2011–Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,08 pada Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama Tabel 8.3. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2012, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 1,40 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,36. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan hanya 0,36 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,59. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.

Periode Maret 2011–Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) menurun.

Tabel 8.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah Maret 2011–Maret 2012

Indeks/Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2011	1,52	2,63	2,08
Maret 2012	1,40	2,36	1,88
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)			
Maret 2011	0,39	0,70	0,55
Maret 2012	0,36	0,59	0,47

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2011 dan Maret 2012

<http://www.bps.go.id>

Penjelasan Teknis

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut jumlahnya sangat banyak, namun “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota). Angka tersebut merupakan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang merupakan patokan untuk menyusun inflasi.

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (*International Labor Organisation/ILO*). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi IHK atau inflasi umum (*headline inflation*)

inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

Secara umum penghitungan inflasi dari IHK mengikuti rumus berikut ini.

$$INF_t = \left(\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \right) \times 100$$

t = bulan atau tahun tertentu

Contoh:

IHK Umum bulan Juli 2012 sebesar 133,16 sedangkan IHK Umum bulan Juni 2012 sebesar 132,23 maka besarnya angka inflasi IHK Umum bulan Juli 2012 adalah $[(133,16-132,23)/132,23] \times 100\% = 0,70\%$.

Inflasi inti (*core inflation*)

inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 692 antara lain, kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen inti (*core*) bulan Juli 2012 sebesar 128,35 sedangkan IHK Komponen inti (*core*) bulan Juni 2012 sebesar 127,66 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen inti (*core*) bulan Juli 2012 adalah $[(128,35-127,66)/127,66] \times 100\% = 0,54\%$.



Inflasi *administered prices*

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya secara umum dapat diatur pemerintah. Berdasar SBH 2007 jumlah komoditasnya sebanyak 21 antara lain bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *administered prices* bulan Juli 2012 sebesar 124,66 sedangkan IHK Komponen *administered prices* bulan Juni 2012 sebesar 124,62 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *administered prices* bulan Juli 2012 adalah $[(124,66-124,62)/124,62] \times 100\% = 0,03\%$.

Inflasi *volatile goods*

Inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2007, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditasnya sebanyak 61 antara lain beras, minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dan sebagainya.

Contoh:

IHK Komponen *volatile goods* bulan Juli 2012 sebesar 162,10 sedangkan IHK Komponen *volatile goods* bulan Juni 2012 sebesar 159,21 maka besarnya angka inflasi IHK Komponen *volatile goods* bulan Juli 2012 adalah $[(162,10-159,21)/159,21] \times 100\% = 1,82\%$.

Paket komoditas

“Sekeranjang” barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota yang diukur IHK-nya.

Diagram timbang

Diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota.

Bahan dasar penyusunan inflasi adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) (*Cost of Living Survey*). SBH diadakan antara 5-10 tahun sekali, dan kini SBH 2007 menjadi dasar penyusunan IHK. Sekitar 115.000 rumah tangga tersebar di seluruh Indonesia ditanya mengenai tingkat pengeluaran serta jenis dan nilai barang/jasa apa saja yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Secara nasional paket komoditas yang diperoleh dari hasil SBH 2007 menunjukkan bobot komoditas makanan turun dari 43,38 persen menjadi 36,12 persen. Selain dari paket komoditas, hasil SBH lainnya yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah Diagram Timbang (*Weighting Diagram*).

Rumus IHK (modifikasi Laspeyres):

$$IHK_n = \frac{\sum \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

dengan:

- IHK_n = Indeks periode ke-n
- P_{ni} = Harga jenis barang i, periode ke-n
- $P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{oi} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k = Jumlah jenis barang paket komoditas

Rumus Inflasi:

a. Untuk bulanan

$$\frac{IHK \text{ bulan } (n) - IHK \text{ bulan } (n-1)}{IHK \text{ bulan } (n-1)} \times 100$$

b. Untuk Tahunan

$$\frac{IHK \text{ bulan } n \text{ tahun } (t) - IHK \text{ bulan } n \text{ tahun } (t-1)}{IHK \text{ bulan } n \text{ tahun } (t-1)} \times 100\%$$

c. Penyusunan IHK Nasional

$$IHK_{Nasional} = \frac{\sum_{i=1}^{66} IHK_i W_i}{100}$$

IHK_i = IHK kota ke-i

W_i = penimbang kota ke-i (diperoleh dari jumlah rumahtangga kota ke-i dibagi dengan total rumahtangga di 66 kota)

Pengumpulan data harga menggunakan daftar pertanyaan dan pencacahannya dibedakan sesuai waktunya: mingguan, 2 (dua) mingguan dan bulanan. Data harga diperoleh dari responden pedagang atau pemberi jasa eceran melalui wawancara.

Contoh Penghitungan Angka Inflasi:**a. Inflasi Tahunan**

Inflasi dihitung secara titik per titik (*point-to-point*) dalam skala bulanan maupun tahunan. Angka-angka di dalam Tabel 2.1 digunakan dalam formula yang telah diberikan. Misalnya angka $IHK_{Des\ 2011}$ sebesar 129,91 diperoleh dari Tabel 2.1, kolom (4), baris Desember, sedangkan angka $IHK_{Des\ 2010}$ sebesar 125,17. Selanjutnya dengan memasukkan angka-angka yang bersesuaian dengan formula di bawah dan dengan sedikit penghitungan diperoleh angka inflasi tahun 2011 sebesar 3,79%.

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Tahun 2010} &= \frac{IHK_{Des\ 2011} - IHK_{Des\ 2010}}{IHK_{Des\ 2010}} \times 100\% \\ &= \frac{129,91 - 125,17}{117,03} \times 100\% \\ &= 3,79\% \end{aligned}$$

b. Inflasi Tahunan Kumulatif (Metode sebelum April 1998)

Angka inflasi tahunan kumulatif dihitung dengan cara menjumlahkan angka inflasi masing-masing bulan, mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun yang bersangkutan. Secara formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Tahun } t &= I_{Jan\ t} + I_{Feb\ t} + \dots + I_{Des\ t} \\ \text{Inflasi Tahun 2010} &= I_{Jan2011} + I_{Feb2011} + \dots + I_{Des2011} \\ &= 0,89\% + 0,13\% + \dots + 0,57\% \\ &= 3,72\% \end{aligned}$$

Angka-angka di atas diperoleh dari Tabel 2.1, kolom (8), baris Januari (0,89%), Februari (0,13%) sampai dengan Desember (0,57%). Perlu ditambahkan bahwa angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula *point to point* hasilnya tidak sama dengan angka inflasi yang dihitung berdasarkan formula kumulatif. BPS dalam penghitungan inflasinya menggunakan formula *point to point*. Jadi untuk contoh tahun 2011, angka inflasi sebesar 3,79% bukan 3,72%.

c. Inflasi Triwulanan Point to Point :

$$\begin{aligned} \text{Inflasi Triwulan I-2011} &= \frac{IHK_{Mar\ 2012} - IHK_{Des\ 2011}}{IHK_{Des\ 2011}} \times 100\% \\ &= \frac{131,05 - 129,91}{129,91} \times 100\% \\ &= 0,88\% \end{aligned}$$

Penyajian dan Akses Data

Data inflasi disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Data inflasi disajikan juga dalam tiga kelompok perubahan harga, yaitu inflasi komoditas yang harganya ber gejolak (*volatile good inflation*), inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price inflation*), dan inflasi inti (*core inflation*).

Data inflasi biasanya disajikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juni 2008 disajikan menurut 66 kota dan nasional (gabungan 66 kota). Data inflasi disajikan dalam waktu bulanan dan dapat diakses melalui Publikasi, CD/Disket, *Website* BPS (<http://www.bps.go.id>), Perpustakaan/Toko Buku BPS, dan unit kerja terkait.

<http://www.bps.go.id>

2 PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)

Perkembangan ekonomi akan sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi (*economic resources*). Sumber daya tersebut adalah tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), dan modal (*capital*). Ketiga sumber daya tersebut dalam ilmu ekonomi disebut sebagai faktor-faktor produksi (*factor of production*). Biasanya, faktor produksi tenaga kerja dibedakan ke dalam tenaga kerja dalam arti pekerja dan tenaga kerja dalam arti keahlian. Dengan menggunakan faktor produksi tersebut, input antara (*intermediate input*) atau bahan baku, misalnya, beberapa keping papan ditambah dengan bahan material lainnya, dapat diubah menjadi sebuah kursi, dengan harga yang lebih mahal bila dibandingkan dengan keping papan semula. Pengertian inilah yang relevan dengan istilah nilai tambah (*value added*).

Sebidang lahan, dikombinasikan dengan pemanfaatan faktor produksi lainnya, digunakan untuk menumbuhkan bibit padi dan menghasilkan padi yang mempunyai nilai yang lebih tinggi pada masa panen. Dengan mengkombinasikan faktor produksi dengan input antara (*intermediate input*) seperti kapas, dapat diproduksi barang lain yang nilainya lebih tinggi. Pengertian ini dapat diteruskan untuk seluruh bentuk input antara dan diproses menjadi output.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi mampu mengubah bahan baku (*intermediate input*) menjadi suatu produk (*output*) yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Dalam terminologi ekonomi, peningkatan nilai dari input menjadi output disebut sebagai nilai tambah (*value added*). Oleh karenanya nilai tambah merupakan “milik” faktor produksi, karena merupakan balas jasa faktor produksi.

Penjumlahan nilai tambah dalam satu periode tertentu di suatu wilayah tertentu dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Nilai tambah yang diciptakan, diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor ekonomi yaitu, sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur, listrik-gas-air bersih, bangunan, perdagangan-hotel-restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan-real estat-jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Nilai PDB disajikan melalui dua harga, yaitu atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) dan harga konstan (*constant prices*). Konsep atas dasar harga konstan merupakan PDB atas dasar harga berlaku yang telah “dihilangkan” pengaruh perubahan harga. Oleh karenanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas penilaian harga konstan. Hal ini mengandung maksud bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan nilai yang masih mengandung perubahan harga.

PDB ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi neto dari luar negeri (*net factor income from abroad*) - pendapatan faktor produksi dari luar dikurangi dengan pendapatan faktor produksi yang ke luar negeri - akan menghasilkan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). PNB dikurangi dengan pajak tak langsung neto dan penyusutan akan menghasilkan pendapatan nasional (*National Income*).

Penyusunan PDB menggunakan referensi baku yang disusun oleh **United Nations** dengan judul *A System of National Accounts* (SNA). Acuan ini, secara terus-menerus diremajakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia yang terjadi. Indonesia sedang menuju acuan SNA 1993/2008, walaupun belum secara keseluruhan.

Wilayah Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau dikuasai oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik wilayah bersangkutan. Output yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan produk domestik. Wilayah domestik adalah suatu daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut.

Output

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Beberapa pengertian output secara lebih rinci dijelaskan berikut ini. Barang dan jasa yang diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar mungkin dijual pada periode yang sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi dan atau setengah jadi. Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan.

Barang setengah jadi pada sektor konstruksi dicatat sebagai output barang jadi sektor tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan output, karena belum dianggap sebagai komoditi. Output lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan dipasarkan selama suatu periode tertentu, biasanya tidak sama dengan penerimaan penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk dijual pada periode selanjutnya.

Biaya Antara

Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara. Termasuk juga sebagai biaya antara adalah pembelian peralatan kerja buruh tambang seperti lampu dan bahan peledak atau peralatan kerja buruh tani atas dasar suatu kontrak. Pengeluaran untuk transpor pegawai ke dan dari tempat bekerja dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perlakuan ini dipakai karena pengeluaran transportasi tersebut sepenuhnya merupakan keputusan yang dilakukan oleh pegawai. Penggantian uang perjalanan, makan, dan sejenisnya yang diadakan oleh pegawai dalam hubungannya untuk melaksanakan tugas, diperlakukan sebagai biaya antara. Pengeluaran perusahaan untuk jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi untuk pegawainya pada umumnya diperlakukan sebagai biaya antara, karena pengeluaran ini adalah untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pegawai secara individu.

Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output. Oleh karenanya secara matematis nilai tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana berikut ini.

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Input antara}$$

NTB = nilai tambah bruto

Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor produksi, yang terdiri dari komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c) pajak tak langsung neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto. Pendapatan faktor merupakan nilai tambah produsen atas penggunaan faktor faktor produksi dalam proses produksi, yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
- 2) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
- 3) Bunga sebagai balas jasa modal
- 4) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Faktor pendapatan yang ditimbulkan oleh produsen komoditi meliputi seluruh unsur pendapatan faktor tersebut, sedang yang ditimbulkan oleh tenaga kerja hanya terdiri dari unsur upah dan gaji.

2.1 Pendekatan Penyusunan PDB

Penjelasan yang telah diberikan merupakan PDB yang disusun menggunakan pendekatan produksi. Dalam penyusunan PDB ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) Pendekatan Produksi, (b) Pendekatan Penggunaan atau sering disebut sebagai Pendekatan Pengeluaran, dan terakhir (c) yang sampai hari ini belum dilakukan adalah Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Dalam pendekatan ini PDB dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Penggunaan sampai saat ini, sektor-sektor ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan lapangan usaha (*activities*), yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa-jasa.

PDB pendekatan produksi menghasilkan PDB sektoral karena di dalamnya dirinci PDB yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, dan setiap sektor tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa subsektor.

Pendekatan Penggunaan (*Expenditure Approach*)

PDB yang disusun dari sisi produksi besarnya harus sama dengan PDB yang disusun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) dan diistilahkan juga dengan penggunaan. Secara agregat terdapat lima komponen, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menggunakan pendekatan ini, PDB dihitung sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Balas jasa tersebut terdiri dari: upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (*interests*) sebagai balas jasa modal, dan keuntungan (balas jasa ketrampilan). Dalam penghitungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan (*income tax*) dan pajak langsung lainnya (*other direct taxes*). Dalam definisi ini, PDB masih mencakup penyusutan (*depreciation*) dan pajak tidak langsung neto-pajak tak langsung dikurangi subsidi-(*net indirect taxes*).

Secara konsepsi, penghitungan PDB dengan menggunakan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Hanya sayang, PDB pendekatan pendapatan, karena keterbatasan data, belum dapat disajikan.

2.2 Komponen PDB Penggunaan

Ada 6 (enam) komponen penggunaan: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok atau inventory, dan ekspor serta impor.

Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa. Untuk perkiraan besarnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya perkiraan pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan melalui proses rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Tabel Input-Output (I-O) 2000.

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi untuk kelompok makanan dan deflasi untuk kelompok bukan makanan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bukan makanan yang sesuai sebagai deflator-nya.

Konsumsi Pemerintah

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup pemerintah umum yang terdiri dari pemerintah pusat yang meliputi unit departemen, lembaga non-departemen dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di bawahnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang-barang pemerintah, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin), tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah yang bukan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tetapi dikonsumsi oleh masyarakat.

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja pemerintah dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Estimasi konsumsi pemerintah dihitung dari konsumsi pemerintah pusat, serta data realisasi pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya penyusutan pemerintah pusat (hasil suatu survei) diperkirakan dua puluh persen dari nilai pembentukan modal tetap bruto pemerintah, sedangkan penyusutan untuk pemerintah daerah sekitar lima persen dari jumlah belanja pegawainya.

Perkiraan pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2000 untuk belanja pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepegangatan sebagai ekstrapolatornya, sedangkan untuk belanja barang dihitung dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor sebagai deflator-nya.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk berproduksi dan biasanya mempunyai umur pakai satu tahun atau lebih.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat dibedakan atas: a) pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi; b) pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan; c) pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Sumber data yang digunakan berasal dari hasil perhitungan output sektor konstruksi oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Impor yang diterbitkan oleh BPS. Metode yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap adalah pendekatan arus barang.

Perubahan Inventori

Perubahan inventori dihitung dari pengurangan posisi inventori pada akhir tahun dengan posisi inventori pada awal tahun. Data mengenai nilai perubahan inventori yang mempunyai data kuantum, seperti: komoditi perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan dan industri berasal dari publikasi masing-masing direktorat terkait di BPS, yaitu Statistik Pertanian, Statistik Pertambangan, Statistik Industri Besar dan Sedang, dengan mengalikan kuantum dan harga masing-masing komoditi. Sementara itu, data inventori yang tidak mempunyai kuantum diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang memuat nilai inventori di dalamnya.

Penghitungan perubahan inventori atas dasar harga konstan 2000 untuk komoditi inventori yang mempunyai data kuantum dilakukan dengan cara revaluasi, sedangkan untuk komoditi inventori yang tidak mempunyai kuantum dilakukan dengan cara deflasi dengan IHPB yang sesuai sebagai *deflator*-nya.

Diskrepansi statistik merupakan selisih penjumlahan nilai tambah bruto (PDB) sektoral dengan penjumlahan komponen permintaan akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. Jadi, diskrepansi statistik merupakan selisih statistik yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain, yang meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk

negara lain. Sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia, dimasukkan sebagai impor. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber yaitu Statistik Ekspor dan Impor, BPS; Neraca Pembayaran baik dari Bank Indonesia maupun Dana Moneter Internasional; serta data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (FOB), sedangkan impor menurut *cost insurance freight* (CIF). Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dibedakan untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor digunakan rata-rata kurs beli dolar AS (dari Bank Indonesia) yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan, sedangkan untuk impor digunakan rata-rata kurs jual dolar AS oleh bank, yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Sumber data yang digunakan untuk estimasi nilai ekspor dan impor barang adalah publikasi tahunan BPS, sedangkan untuk ekspor dan impor jasa diperoleh dari neraca pembayaran yang dipublikasi oleh Bank Indonesia.

Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi

Pendapatan neto di sini hanya mencakup pendapatan atas modal dan bunga neto yang diturunkan dari Neraca Pembayaran Indonesia yang berasal dari Bank Indonesia. Pendapatan neto yang dimaksud di sini adalah selisih antara pendapatan yang mengalir masuk dari luar negeri dengan pendapatan yang mengalir ke luar negeri. Data asal yang ada pada neraca pembayaran disajikan dalam nilai dolar AS. Data pendapatan yang mengalir masuk dan keluar telah dikonversikan dari nilai dolar AS masing-masing dengan menggunakan kurs ekspor dan impor rata-rata tertimbang.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga per unit impor dan ekspor masing-masing sebagai deflator-nya.

Pajak Tidak Langsung Neto dan Penyusutan

Pajak tidak langsung neto mencakup pajak tidak langsung yang diterima pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikurangi dengan subsidi bahan bakar minyak dan pupuk. Data pajak tidak langsung dan subsidi tersebut bersumber pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan daerah yang diperoleh baik dari Kementerian Keuangan maupun BPS. Selanjutnya, besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase terhadap PDB yang diturunkan dari Tabel Input Output Indonesia 2000.

Perkiraan atas dasar harga konstan 2000, untuk pajak tidak langsung neto dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga implisit PDB, sedangkan untuk penyusutan menggunakan persentase yang sama terhadap PDB atas dasar harga konstan.

PDB atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) atau **nominal**, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan.

PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.

PDB harga konstan (riil) merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahan harganya telah “dikeluarkan”. Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor.

Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara.

Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai rata-rata PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai ini belum memperhatikan kesenjangan antar satu/kelompok orang dengan kelompok lainnya.

PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (q to q)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (y on y)

PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dalam tahun tertentu dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi c to c

PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran dalam PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Untuk memperoleh sumber-sumber pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing *share* sektor atau komponen pengeluaran terhadap PDB.

2.3 Penilaian Harga Konstan PDB

Dalam kasus-kasus data harga tahun-tahun bersangkutan tidak tersedia, dilakukan estimasi dengan melihat berbagai indeks harga yang bersesuaian. Seperti telah dijelaskan, terdapat 2 (dua) penilaian harga: harga berlaku dan harga konstan. Untuk memperoleh penilaian harga berlaku cukup mudah, karena hanya mengikuti harga yang ada. Namun demikian, ketika data diperlukan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, diperlukan penilaian atas dasar harga konstan. Terdapat tiga metode yang digunakan memperoleh penilaian harga atas dasar harga konstan, yaitu:

- a. **Revaluasi** yaitu perkalian kuantum produksi tahun yang berjalan dengan harga tahun dasar tertentu (tahun 2000).
- b. **Ekstrapolasi** yaitu dengan cara mengalikan nilai tahun dasar tertentu dengan suatu indeks kuantum tahun-tahun setelahnya dibagi 100.
- c. **Deflasi** yaitu dengan cara membagi nilai atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang bersesuaian dibagi 100.

2.4 Publikasi dan Ketersediaan Data

Publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik meliputi PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sampai saat ini publikasi yang tersedia meliputi:

- a. Penyampaian Berita Resmi Statistik mengenai PDB dan PDRB serentak di seluruh Indonesia setiap 35 hari setelah berakhirnya triwulan berjalan. (Misal triwulan I (Januari-Maret) akan diumumkan tanggal 5 Mei tahun berjalan)
- b. Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2007–2010
- c. Pendapatan Nasional Triwulanan Indonesia Tahun 2006–2010
- d. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2005–2009 (menurut Lapangan Usaha)
- e. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Tahun 2005–2009 (menurut Penggunaan)
- f. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2005–2009

EKSPOR-IMPOR BARANG

3

BPS dengan memanfaatkan dokumen pemberitahuan ekspor/impur barang yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dilakukan pengolahan dan penyajian data statistik ekspor dan impor barang di Indonesia, dan hasilnya disajikan dalam Statistik Ekspor-Impor Barang.

Penyajian data ekspor-impur mencakup volume maupun nilai, menurut komoditi (satu jenis barang, kelompok barang); negara tujuan/asal, dan pelabuhan muat/bongkar barang di suatu provinsi.

Data ini berguna bagi pemerintah, swasta dan perorangan. Bagi pemerintah, data tersebut dapat membantu proses perumusan kebijakan maupun untuk memantau kinerja perekonomian. Di samping itu, data tersebut dipakai pula untuk menyusun Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (BOP). Bagi swasta dan perorangan, statistik ekspor-impur dapat dipakai untuk berbagai analisis ekonomi dan sosial.

Pencatatan data ekspor-impur oleh BPS sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), *United Nations Statistical Division* (UNSD). Sesuai rekomendasi tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (*the custom frontier*) sebagai wilayah statistik. Wilayah ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impur yang harus melalui penyelesaian pabean (*customs declaration*). Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan data statistik ekspor-impurnya dilakukan melalui survei ke perusahaan eksportir (pelaku ekspor) dan importir (pelaku impor).

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impur barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam *International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions* (series M no. 52 Revisi 2) yang diterbitkan oleh United Nations tahun 1998. Sebagai anggota *United Nations Statistical Office* dan berdasarkan konvensi internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep dan definisi tersebut. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan konsep dan definisi *International Merchandise Trade Statistics* beberapa hal dapat diberikan di sini.

- a. Ekspor barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun nonkomersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik ekspor adalah: (1) Pakaian, barang pribadi dan perhiasan milik penumpang yang bepergian ke luar negeri; (2) Barang-

- barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3) Barang untuk eksebis/pameran; (4) Peti kemas untuk diisi kembali; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang untuk contoh (*sample*).
- b. Impor barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik impor adalah: (1) Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat TV dan sebagainya; (2) Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3) Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksebis/pameran; (4) Pembungkus/peti kemas; (5) Uang dan surat-surat berharga; (6) Barang-barang sebagai contoh (sampel).

Sebagian impor kapal laut dan pesawat beserta suku cadangnya termasuk dalam statistik impor. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai barang impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (*re-import*).

Statistik ekspor-impor di Indonesia diperoleh dari administrasi kepabeanan. Semua barang yang masuk atau ke luar dari batas-batas kepabeanan (*customs area*) Indonesia harus dicatat oleh Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Informasi yang dicatat antara lain tujuan/asal dan jenis barang (komoditi) tersebut.

Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan Statistik Ekspor barang memberlakukan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*). Di mana semua barang yang ke luar dari wilayah Indonesia dicatat sebagai ekspor. Dengan demikian barang-barang yang keluar dari kawasan khusus (seperti Kawasan Berikat) juga dimasukkan sebagai barang ekspor.

Statistik ekspor disusun dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi oleh eksportir. Periode penentuan ekspor adalah tanggal diberikannya izin muat barang tersebut (*custom declaration*) yang diberikan oleh KPPBC. Metode pencatatan nilai ekspor adalah pada harga FOB (*Free on Board*) yaitu harga barang sampai dimuat di kapal.

Sampai dengan tahun 2007 sistem pencatatan Statistik Impor masih mempergunakan sistem perdagangan khusus (*special trade system*). Dalam sistem ini, wilayah Kawasan Berikat dianggap sebagai Luar Negeri, sehingga barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat tidak dicatat sebagai impor. Namun, sejak Januari 2008 barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat dicatat sebagai impor sehingga pencatatan statistik impor menggunakan sistem Perdagangan Umum (*general trade system*).

Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dokumen kepabeanan, yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir dan sudah mendapat legalisasi/persetujuan bongkar barang dari KPPBC setempat. Nilai impor dicatat dalam harga CIF (*Cost, Insurance and Freight*).

Klasifikasi Komoditi

Komoditi (barang) ekspor-impor diklasifikasikan menurut klasifikasi komoditas internasional yaitu *International Commodity Description and Coding System—Harmonized System (HS)* yang dibuat oleh Organisasi Bea dan Cukai Dunia (*World Customs Organization/WCO*) dan *Standards International Trade Classification (SITC)* Revisi 3. Komisi Statistik PBB (*UN Statistical Commission*) menyarankan kepada negara-negara di dunia untuk menggunakan klasifikasi HS dalam penyajian data statistik perdagangan internasional.

Kode HS yang digunakan saat ini terdiri dari 10 digit, yaitu 6 digit pertama merupakan standar internasional, 2 digit selanjutnya merupakan standar ASEAN, dan 2 digit terakhir hanya berlaku untuk negara bersangkutan. Kode HS yang dipakai sekarang berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) Tahun 2007, sementara itu untuk kode negara berdasarkan *United Nation Country Codes*.

Penyajian Data

Penyajian dan penyebarluasan statistik ekspor-impor diumumkan oleh BPS pada hari kerja pertama setiap bulan melalui *press-release* bersamaan dengan pengumuman data strategis lainnya.

Data bulanan dan tahunan baik secara agregasi maupun rinci per komoditi tersedia bagi publik dalam bentuk *hard copy* (buku) dan *soft copy* (disket, CD dsb). Di samping itu, publik juga dapat mengakses data pada website BPS dengan alamat: <http://www.bps.go.id>. Pada website tersebut tersaji data ekspor-impor dalam bentuk statis dan dinamis. Dalam bentuk statis, data tersedia dalam bentuk tabel-tabel statis yang tidak bisa diubah. Sementara dalam bentuk dinamis, pengguna data dapat mengunduh data ekspor-impor sesuai dengan komoditi yang diperlukan.

3.1 Statistik ekspor-impor yang dapat disajikan dan bersifat substantif antara lain:

- a. Impor menurut Komoditi (HS 1, 2, dan 10 digit; SITC 1, 2 dan 3 digit; Impor menurut Penggunaan Barang /*Broad Economic Categories*)
- b. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal
- c. Ekspor/Impor menurut Pelabuhan Muat/Bongkar
- d. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Negara Tujuan/Asal
- e. Ekspor/Impor menurut Komoditi dan Pelabuhan Muat/Bongkar
- f. Ekspor/Impor menurut Negara Tujuan/Asal dan Komoditi

3.2 Penyajian data dikategorikan dalam 2 (dua) status yaitu:

- a. Angka Sementara ekspor-impor dirilis sekitar 1 (satu) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh, data yang dicatat pada bulan Juli akan dirilis pada bulan September pada tahun yang sama, dan diterbitkan setiap bulan.
- b. Angka Tetap akan disajikan 2 (dua) bulan setelah akhir bulan pencatatan. Sebagai contoh angka tetap ekspor-impor Juli akan dirilis pada bulan Oktober tahun yang sama.

Sedangkan data ekspor-impor tahunan dapat diperoleh dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pencatatan. Sebagai contoh, angka ekspor tahun 2008 dapat diperoleh pada bulan Maret 2009.

<http://www.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku “**Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment**” An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992.

Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Menurut Konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Diagram Ketenagakerjaan



Penduduk

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia Kerja

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja.

Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Beberapa contoh:

- Batas bawah: Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).
- Batas atas: Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak ada batas atas.

Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur.

Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup; penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya.

Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Penganggur

Definisi baku untuk Penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi penganggur mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:

Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- a. mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- b. mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;

- c. mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Aktivitas/Kegiatan Ekonomi

Aktivitas/kegiatan ekonomi yang digunakan merujuk pada *the United Nations System of National Accounts* (SNA). Penduduk usia kerja dikategorikan sebagai bekerja/mempunyai pekerjaan jika yang bersangkutan bekerja (meskipun hanya bekerja satu jam dalam periode referensi) atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja.

Sejalan dengan *the labor force framework*, definisi internasional untuk bekerja didasarkan pada periode referensi yang pendek (satu minggu atau satu hari); a *snapshot picture of the employment situation at a given time*.

Pekerja Tidak Penuh

Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini kurang dari 35 jam seminggu).

Setengah Penganggur

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian/publikasinya menggunakan 9 kategori/sector yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;

3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas, dan Air;
5. Bangunan;
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel;
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi;
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan;
9. Jasa Kemasyarakatan.

Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Status Pekerjaan terbagi menjadi:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/Karyawan/Pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Data Ketenagakerjaan diperoleh melalui kegiatan survei Sakernas

Variabel substantif yang dikumpulkan

- Identitas individu (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan pendidikan);
- Kegiatan Seminggu Yang Lalu (bekerja, penganggur, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya);
- Pekerjaan Utama (lapangan usaha/pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, pendapatan/upah/gaji bersih);
- Pekerjaan Tambahan (lapangan usaha/pekerjaan);
- Kegiatan Mencari Pekerjaan/Mempersiapkan Usaha;
- Pengalaman Kerja.

Kemampuan Penyajian

Berdasarkan metodologi dan variabel substantif, maka hasil Sakernas dapat disajikan menurut:

- Provinsi (kab/kota untuk Sakernas Agustus)
- Daerah Perkotaan/Pedesaan
- Jenis Kelamin
- Umur
- Pendidikan
- Lapangan Usaha/Pekerjaan
- Jenis Pekerjaan
- Status Pekerjaan
- Jam Kerja

Periode referensi

Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya.

Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Kriteria Satu Jam

Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan *joint analysis* antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.



PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar). Penghitungan produksi dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. Angka Produksi *subround* 1 (Januari–April) merupakan hasil perkalian luas panen *subround* 1 dengan produktivitas *subround* 1.
2. Angka Produksi *subround* 2 (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian luas panen *subround* 2 dengan produktivitas *subround* 2.
3. Angka Produksi *subround* 3 (September–Desember) merupakan hasil perkalian luas panen *subround* 3 dengan produktivitas *subround* 3.
4. Angka Produksi Januari–Desember merupakan penjumlahan produksi *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
5. Angka Luas panen Januari–Desember merupakan penjumlahan luas panen *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3.
6. Angka Produktivitas Januari–Desember adalah hasil bagi produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

Publikasi produksi tanaman pangan tahun 2012 diterbitkan setiap empat bulan (tiga kali setahun) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pertama, pada awal bulan Maret berupa Angka Sementara (ASEM) tahun 2011. Kedua, pada awal bulan Juli berupa Angka Tetap (ATAP) tahun 2011 dan Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2012. Ketiga, pada awal bulan November berupa Angka Ramalan (ARAM II) tahun 2012. Dengan demikian, data produksi tanaman pangan setiap tahun disajikan dengan 4 (empat) status angka yang berbeda, yaitu:

1. ARAM I terdiri dari realisasi produksi Januari–April dan angka ramalan Mei–Desember berdasarkan realisasi angka luas tanaman akhir bulan April.
2. ARAM II terdiri dari realisasi produksi Januari–Agustus dan angka ramalan September–Desember berdasarkan realisasi angka luas tanaman akhir bulan Agustus.
3. ASEM merupakan realisasi angka produksi Januari–Desember tetapi belum final karena mengantisipasi kelengkapan laporan.
4. ATAP adalah realisasi angka produksi selama satu tahun (Januari–Desember) dan merupakan angka final.

Para konsumen data perlu mencermati status angka tersebut dalam penggunaannya baik untuk bahan evaluasi/monitoring maupun perencanaan dan diharapkan selalu mengacu kepada hasil penghitungan dengan status angka yang terakhir dipublikasikan. ARAM I tidak digunakan lagi apabila ARAM II telah diterbitkan; ARAM II tidak digunakan lagi apabila ASEM telah diterbitkan; ASEM tidak digunakan lagi apabila ATAP telah diterbitkan.

Status Angka	Jadwal Publikasi (tahun t)	Subround		
		Januari–April	Mei– Agustus	September–Desember
1. ASEM 2011	Awal Maret 2012	Realisasi 2011 (angka belum final)		
2. ATAP 2011	Awal Juli 2012	Realisasi 2011 (angka final)		
3. ARAM I 2012	Awal Juli 2012	Realisasi 2012	Ramalan	
4. ARAM II 2012	Awal November 2012	Realisasi 2012		Ramalan

Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan yang dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan KCD. Pengumpulan data produktivitas dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di lapangan pada plot ubinan berukuran $2\frac{1}{2}$ m x $2\frac{1}{2}$ m. Sedangkan data ramalan diperoleh dari hasil penghitungan dengan menggunakan model statistik. Model yang digunakan untuk peramalan luas panen adalah dengan persamaan regresi. Sedangkan produktivitas diramalkan dengan menggunakan persamaan *trend linier* atau *smoothing eksponensial*, tergantung pola datanya.

<http://www.bps.go.id>

PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR

6.1 Indeks Produksi Industri Manufaktur

Indeks produksi industri pengolahan besar dan sedang dihasilkan dari pengolahan survei Industri Pengolahan Besar dan Sedang (IBS) Bulanan yang datanya diperoleh dari perusahaan besar dan sedang yang terpilih sebagai sampel.

Angka indeks yang dihasilkan menggambarkan perkembangan produksi sektor industri pengolahan secara lebih dini karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan. Data bulanan tersebut juga dapat disajikan sebagai data triwulanan maupun tahunan. Data Triwulanan merupakan rata-rata dari indeks bulanan pada triwulan yang bersangkutan dan indeks tahunan merupakan rata-rata 4 (empat) triwulan pada tahun yang bersangkutan. Angka-angka yang disajikan hanyalah sebagai salah satu informasi untuk menilai pertumbuhan industri.

6.2 Metodologi Penghitungan Indeks Produksi Industri Manufaktur

1. Data runtun indeks produksi industri besar dan sedang bulanan dan triwulanan yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil Survei IBS Bulanan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks menggunakan Tahun dasar 2010=100.
2. Kerangka sampel yang digunakan berasal dari hasil Survei IBS Tahunan, Tahun 2009, meliputi 1.703 perusahaan terpilih yang representatif untuk 3 digit KBLI revisi 4 dan 2 digit KBLI untuk setiap Provinsi Tahun 2009.
3. Metodologi penarikan sampel menggunakan metode *Cut Off Point* dan *Probability Proportional to Size* (PPS). Metode *Cut Off Point* adalah metode penarikan sampel dengan berdasarkan nilai output tertentu yang akan dipilih secara certainty diharapkan dapat memenuhi keragaman sampel sebesar 80% terhadap total output, dan sisanya dipilih dengan metode PPS *sampling* dengan nilai *output* sebagai *size*-nya. Metode penarikan sampel yang digunakan sebagai berikut:
 - a). Jumlah sampel yang terpilih adalah 1.703 perusahaan yang mewakili 74,71 persen dari *output* populasinya.
 - b). Penarikan sampel dengan menggunakan metode *Cut Off Point* dengan nilai *output* di atas 737,550 milyar terpilih sebanyak 395 perusahaan yang dikategorikan "C1", berdasarkan *top 1 percent of output per worker* terpilih sebanyak 108 perusahaan yang dikategorikan "C2", berdasarkan *ratio output >50 persen and share output >25 persen* terpilih sebanyak 246 perusahaan yang dikategorikan "C3", berdasarkan *ratio output >50 persen and share output >25 persen per provinsi* terpilih sebanyak 103 perusahaan yang dikategorikan "C4", dan sisanya dipilih dengan *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan *output* sebagai *size*-nya sebanyak 851 perusahaan yang dikategorikan sampel "S".

4. Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan Metode *Discrete Divisia*. Formula *Discrete Divisia* berdasarkan atas rasio antarbulan masing-masing variabel dengan tahapan agregasi secara berjenjang sebagai berikut:
 1. Menghitung rasio perusahaan
 2. Menghitung rasio KBLI
 3. Menghitung rasio total
 4. Menghitung indeks KBLI dan total

Kemudian dari rasio antarbulan masing-masing variabel tersebut di atas dibuat indeks berantai (*chain index*) dimulai dari indeks 3 digit KBLI, kemudian 2 digit KBLI, kemudian 1 digit KBLI.
5. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks produksi bulanan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Rasio Perusahaan

$$R_{ij} = e^{\left[\sum_k \frac{V_{ijk}}{\sum_k V_{ijk}} \times \ln \left(\frac{Q_{ijk2}}{Q_{ijk1}} \right) \right]}$$

b. Rasio KBLI

$$R_i = e^{\left[\sum_j \frac{W_{ij} V_{ij}}{\sum_j W_{ij} V_{ij}} \times \ln (R_{ij}) \right]}$$

c. Rasio Total

$$R_{tot} = e^{\left[\sum_i \frac{W_i V_i}{\sum_i W_i V_i} \times \ln (R_i) \right]}$$

d. Indeks KBLI dan Total

$$I_t = I_{(t-1)} \times R$$

di mana:

a. Rasio Perusahaan

- R_{ij} = rasio perusahaan *j* dalam KBLI-*i* pada bulan ke-2 terhadap bulan ke-1
- V_{ijk} = nilai produksi dari komoditi *k* untuk perusahaan *j* dalam KBLI-*i* selama periode dua bulan
- Q_{ijk1} = produksi dari komoditi *k* untuk perusahaan *j* dalam KBLI-*i* pada bulan ke-1
- Q_{ijk2} = produksi dari komoditi *k* untuk perusahaan *j* dalam KBLI-*i* pada bulan ke-2

- b. R_i = rasio KBLI- i
 V_{ij} = nilai produksi perusahaan j dalam KBLI- i selama periode dua bulan, dimana:

$$V_{ij} = \sum_k V_{ijk}$$

$W_{ij\text{adj}}$ = penimbang sampling yang disesuaikan untuk perusahaan j dalam KBLI- i

- c. R_{tot} = rasio total
 $W_i V_i$ = total nilai produksi tertimbang dari seluruh perusahaan untuk KBLI- i selama periode dua bulan, dimana:

$$W_i V_i = \sum_j W_{ij\text{adj}} V_{ij}$$

- d. R = rasio
 I_t = indeks pada bulan ke- t
 I_{t-1} = indeks pada bulan ke- $(t-1)$

<http://www.bps.go.id>

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Sumber data

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2012 adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi Maret 2012. Jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.



7.1 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yang merupakan Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

7.2 Ukuran Kemiskinan

- a. *Head Count Index* ($HCI-P_0$), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

<http://www.bps.go.id>

Daftar Singkatan dan Akronim

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Aram	Angka ramalan
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nation</i>
Asem	Angka sementara
Atap	Angka tetap
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BOP	<i>Balance of Payment</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BTBMI	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
c to c	<i>cummulative to cummulative</i>
CD	<i>Compact Disc</i>
CIF	<i>Cost Insurance Freight</i>
COICOP	<i>Classification of Individual Consumption According to Purpose</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
Deptan	Departemen Pertanian
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FOB	<i>Free on Board</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GK	Garis Kemiskinan
GKG	Gabah Kering Giling
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non-Makanan
GNP	<i>Gross National Product</i>
HCI	<i>Head Count Index</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHPB	Indeks Harga Perdagangan Besar
ILO	<i>International Labor Organization</i>
I-O	Input-Output
KCD	Kepala Cabang Dinas
KPPBC	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
KSK	Koordinator Statistik Kecamatan
LTAB	Luas Tanaman Akhir Bulan

Migas	Minyak dan gas
Nonmigas	Nonminyak dan gas
NTB	Nilai Tambah Bruto
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PNB	Produk Nasional Bruto
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
ppp	<i>purchasing power parity</i>
pps	<i>proportional probability to size</i>
PSE05	Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
q to q	<i>quarter to quarter</i>
RTS	Rumah Tangga Sasaran
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SBH	Survei Biaya Hidup
SD	Sekolah Dasar
SITC	<i>System of International Trade Classification</i>
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNA	<i>System of National Accounts</i>
SP	Sensus Penduduk
SPKKD	Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar
SR	<i>Subround</i>
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	<i>United Nation Development Program</i>
UNSD	<i>United Nations Statistical Division</i>
WCO	<i>World Customs Organization</i>
y on y	<i>year on year</i>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

